



LAPORAN KINERJA

**SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2018**



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
2019**

PENGANTAR

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2018 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas Sekretariat Wakil Presiden atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta menggambarkan kinerja yang dicapai oleh Sekretariat Wakil Presiden dalam menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam mendukung pelaksanaan tugas Wakil Presiden, serta pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Wakil Presiden.

Laporan Kinerja ini merupakan pelaporan tahun keempat dari Rencana Strategis Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2015-2019 yang menyajikan target, realisasi, dan capaian kinerja atas dua sasaran strategis Sekretariat Wakil Presiden, yaitu (1) Meningkatnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam mendukung pelaksanaan tugas Wakil Presiden; dan (2) Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Wakil Presiden. Selain itu, laporan ini menyampaikan capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Wakil Presiden.

Seluruh jajaran Sekretariat Wakil Presiden menyadari bahwa komitmen, kerja keras dan kerja sama sangat diperlukan, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditentukan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas peran serta dan kerja keras seluruh jajaran Sekretariat Wakil Presiden selama tahun 2018. Harapan kami, Laporan Kinerja Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2018 dapat menjadi media evaluasi dan pendorong bagi segenap pimpinan serta staf di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2019
Kepala Sekretariat Wakil Presiden,



Mohamad Oemar

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2018 menyajikan informasi capaian kinerja sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan indikator kinerja lainnya berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2018 yang mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2015-2019.

Hasil capaian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan secara umum telah sesuai dengan yang ditargetkan, yaitu 100%. Total pagu anggaran untuk melaksanakan sasaran-sasaran tersebut adalah sebesar Rp 229.371.904,00 dengan realisasi Rp 213.512.707.672,00 (93,09%). Capaian kinerja sasaran dan realisasi anggaran tersebut menunjukkan adanya efisiensi serta optimalisasi penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis.

Sasaran Strategis 1:

Meningkatnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam mendukung pelaksanaan tugas Wakil Presiden. Capaian kinerjanya 100% dan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp 2.194.866.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.124.248.618 (96,78%).

Sasaran Strategis 2:

Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Wakil Presiden. Capaian kinerjanya adalah 100% dan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp 227.177.038.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 211.388.459.054,00 (93,05%).

Selain kinerja tersebut di atas, laporan ini juga menyampaikan pemanfaatan informasi kinerja dan kinerja lainnya berupa penghargaan dari para pemangku kepentingan.

Komitmen yang tinggi dari para pimpinan dan staf Sekretariat Wakil Presiden merupakan faktor dominan yang mempengaruhi capaian kinerja sasaran strategis di tahun 2018 dan peningkatan kinerja selanjutnya.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	
Daftar Gambar	
Bab I – Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	2
1.3. Struktur Organisasi	3
1.4. Sumber Daya Manusia	4
1.5. Mandat dan Peran Strategis.....	5
1.6. Permasalahan Utama.	7
1.7. Sistematika Penulisan Laporan	8
Bab II – Perencanaan Kinerja	9
2.1. Rencana Strategis Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2015-2019	9
2.2. Perjanjian Kinerja Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2018	13
Bab III – Akuntabilitas Kinerja	15
3.1. Capaian Kinerja Sekretariat Wakil Presiden.....	15
3.2. Perbandingan Capaian Kinerja IKU Tahun 2017 dan Tahun 2018	53
3.3. Perbandingan Capaian Kinerja IKU Tahun 2015 s.d. Tahun 2018	54
3.4. Akuntabilitas Keuangan	55
3.5. Pemanfaatan Informasi Kinerja	59
3.6. Capaian Kinerja Lainnya.....	59
3.7. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	60
Bab IV – Penutup.....	62
4.1. Simpulan.....	62
4.2. Upaya ke Depan	63
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. – Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan	11
Tabel 2.2. – Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	11
Tabel 2.3. – Perjanjian Kinerja Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2018	14
Tabel 3.1. – Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Sekretariat Wakil Presiden	15
Tabel 3.2. – Penanggung Jawab Masing-masing Indikator Kinerja	18
Tabel 3.3. – Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018	19
Tabel 3.4. – Kegiatan Dukungan Layanan Kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden Tahun 2018	23
Tabel 3.5 – Tabel Nilai Skala Likert yang digunakan pada Kuesioner	24
Tabel 3.6. – Nilai Persepsi, Interval IKP, Interval Konversi IKP, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Pelayanan untuk Layanan Kerumahtanggaan	25
Tabel 3.7. – Nilai Rata-rata Tiap Pernyataan	25
Tabel 3.8. – Kegiatan Dukungan Layanan Keprotokolan kepada Wakil Presiden Tahun 2018	27
Tabel 3.9. – Layanan Keprotokolan kepada Wakil Presiden Tahun 2018	27
Tabel 3.10. – Rekapitulasi Notulen Wakil Presiden Tahun 2018	45
Tabel 3.11 – Tabel Nilai Skala Likert yang digunakan pada Kuesioner	45
Tabel 3.12. – Nilai Persepsi, Interval IKP, Interval Konversi IKP, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Pelayanan untuk Layanan Keprotokolan	47
Tabel 3.13. – Nilai Rata-rata Tiap Pernyataan	47
Tabel 3.14.– Kegiatan Pers, Media, dan Pelayanan Informasi serta Dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan acara lainnya di Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2018.....	49
Tabel 3.15. – Pelayanan Administrasi Umum di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2018	50
Tabel 3.16. – Perbandingan Capaian Kinerja Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2017 dan 2018	53
Tabel 3.17. – Perbandingan Capaian Kinerja Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2015 s.d. 2018	54
Tabel 3.18 – Pagu Anggaran Kegiatan IKU dan IK Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2018	56
Tabel 3.19 – Pagu Anggaran Kegiatan IKU Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2018	57
Tabel 3.20 – Realisasi Anggaran per Program Tahun 2018	58
Tabel 3.21 – Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2018	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Komposisi Aparatur Sekretariat Wakil Presiden Berdasarkan Status (PNS dan Tenaga Perbantuan)	4
Gambar 2.	Komposisi Aparatur Sekretariat Wakil Presien Berdasarkan Jenis Kelamin per Desember 2018	4
Gambar 3.	Komposisi Aparatur Sekretariat Wakil Presiden Berdasarkan Tingkat Pendidikan per Desember 2018.....	5
Gambar 4.1.	Pertemuan dengan Wakil Presiden Panama pada 26 Oktober 2018.....	28
Gambar 4.2.	Pertemuan dengan Presiden Zanzibar pada 1 Agustus 2018.	30
Gambar 4.3.	Pertemuan dengan Wakil Presiden Amerika Serikat pada 25 September 2018.....	31
Gambar 4.4.	Pidato pada Sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 27 September 2018.....	33
Gambar 4.5.	Pidato pada Sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 27 September 2018.....	33
Gambar 4.6.	Foto bersama dengan anggota KTT G20 pada 30 November 2018.	54
Gambar 4.7.	Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa di NTB	55
Gambar 4.8.	Rapat Koordinasi Pasca Gempa dan Tsunami di Sulawesi Tengah.....	57
Gambar 4.9.	Kunjungan Pasca Gempa dan Tsunami di Sulawesi Tengah.....	57
Gambar 4.10.	Pembukaan Widyakara Nasional Pangan dan Gizi XI di Jakarta Selatan.	59
Gambar 4.11.	Penandatanganan Kerjasama antara INASGOC dengan Perusahaan Sponsor Asian Games 2018.....	40
Gambar 4.12.	Foto Bersama dengan CEO Nippon Electric Company di Jakarta.....	41
Gambar 4.13.	Pertemuan dengan Presiden Asian Paralympic Committee di Jakarta	42
Gambar 4.14.	Rapat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah di Jakarta	43
Gambar 4.15.	Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional di Jakarta	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tata Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat untuk membenahi sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa. Salah satu asas penyelenggaraan negara yang baik adalah asas akuntabilitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan tersebut menjelaskan akuntabilitas kinerja sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2018 mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2015-2019, Perjanjian Kinerja Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2018, dan untuk regulasinya pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 mengatur pelaksanaan, menyempurnakan, dan meningkatkan fungsi sistem AKIP menjadi salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, beroperasi secara efisien, efektif, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; terwujudnya transparansi instansi pemerintah; terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Sekretariat Wakil Presiden selama tahun 2018, media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja instansi dalam satu tahun anggaran kepada berbagai pihak yang berkepentingan, dan umpan balik untuk perbaikan kinerja pada tahun mendatang.

1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara dan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, menjelaskan bahwa:

Kedudukan Sekretariat Wakil Presiden

Sekretariat Wakil Presiden berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara, dipimpin oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden, dan dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat Wakil Presiden dapat menerima penugasan langsung dari Wakil Presiden.

Tugas Sekretariat Wakil Presiden

Sekretariat Wakil Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan dan keprotokolan, serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi Sekretariat Wakil Presiden

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Sekretariat Wakil Presiden menyelenggarakan fungsi:

- a. dukungan data, informasi, dan analisis kebijakan di bidang ekonomi, infrastruktur, dan kemaritiman; pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan; serta pemerintahan kepada Wakil Presiden;
- b. pelayanan kerumahtanggaan Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden;
- c. urusan keprotokolan Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden;
- d. penyiapan dan pelaksanaan acara kenegaraan dan acara resmi yang dipimpin atau dihadiri Wakil Presiden, dan acara lainnya yang dihadiri Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden;
- e. penyiapan dan pelaksanaan acara perjalanan Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden baik di dalam maupun di luar negeri;

- f. pengoordinasian kegiatan pers, media, dan pelayanan informasi serta dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan acara lainnya di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden;
- g. pelaksanaan hubungan dan kerja sama dengan lembaga negara, kementerian negara, dan lembaga pemerintah non-kementerian lainnya, serta instansi terkait yang diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- h. perencanaan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden;
- i. pengelolaan dana operasional Wakil Presiden;
- j. koordinasi dengan satuan-satuan organisasi lain di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet dalam rangka pemberian teknis dan administrasi, serta analisis bagi pelaksanaan tugas-tugas Wakil Presiden;
- k. pemberian petunjuk-petunjuk teknis di bidang kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada para Ajudan Wakil Presiden dan Ajudan Istri/Suami Wakil Presiden;
- l. pengoordinasian Tim Dokter Kepresidenan dalam rangka pemberian layanan kesehatan Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden;
- m. pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Presiden dan Menteri Sekretaris Negara.

1.3. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Sekretariat Wakil Presiden dibantu oleh:

- a. **Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman**
mempunyai tugas membantu Kepala Sekretariat Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi, serta analisis kebijakan di bidang ekonomi, infrastruktur, dan kemaritiman kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara.
- b. **Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan**
mempunyai tugas membantu Kepala Sekretariat Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi, serta analisis kebijakan di bidang pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara.
- c. **Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan**
mempunyai tugas membantu Kepala Sekretariat Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi, serta analisis kebijakan di bidang pemerintahan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara.

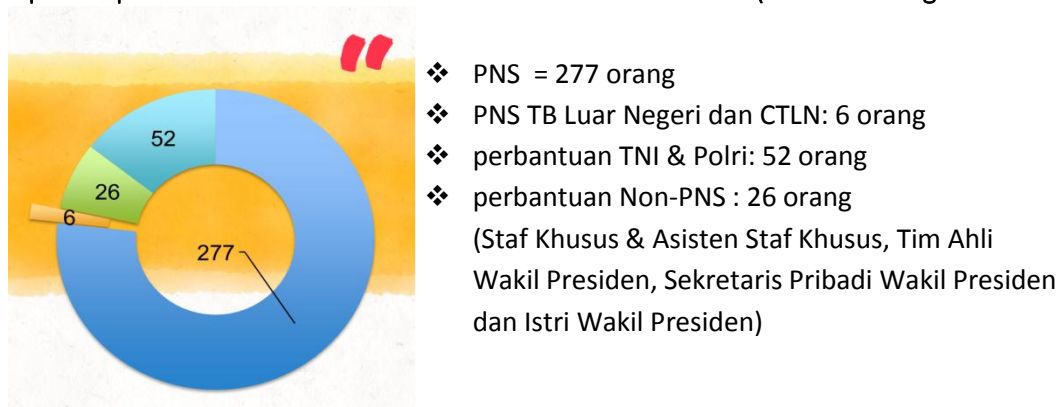
d. **Deputi Bidang Administrasi**

mempunyai tugas membantu Kepala Sekretariat Wakil Presiden dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden di bidang keprotokolan, kerumahtanggaan, media massa, perencanaan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan teknologi informasi, serta pelayanan administrasi umum dan kegiatan penting lainnya di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden.

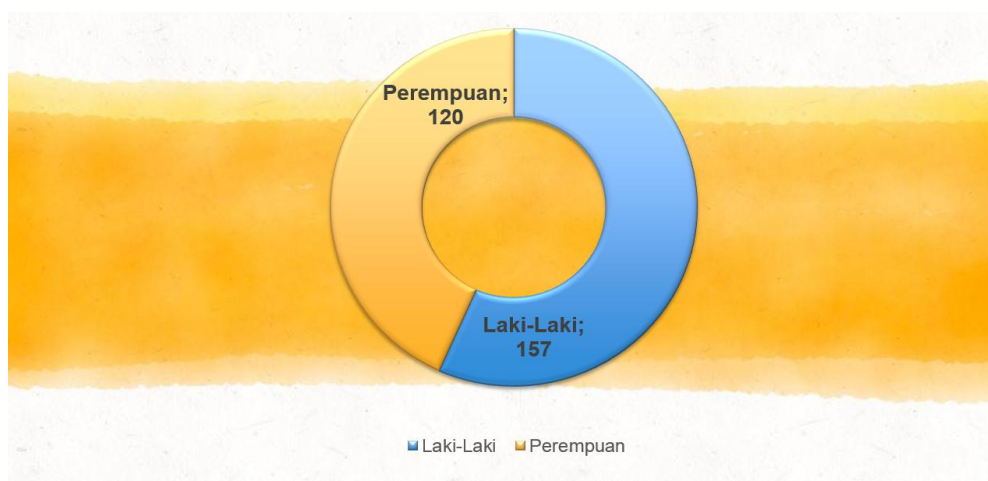
1.4. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan Desember 2018, Sekretariat Wakil Presiden didukung oleh 361 orang aparatur dari berbagai bidang keahlian dan tenaga yang diperbantukan pada posisi-posisi tertentu, seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan tenaga non-aparatur sipil negara.

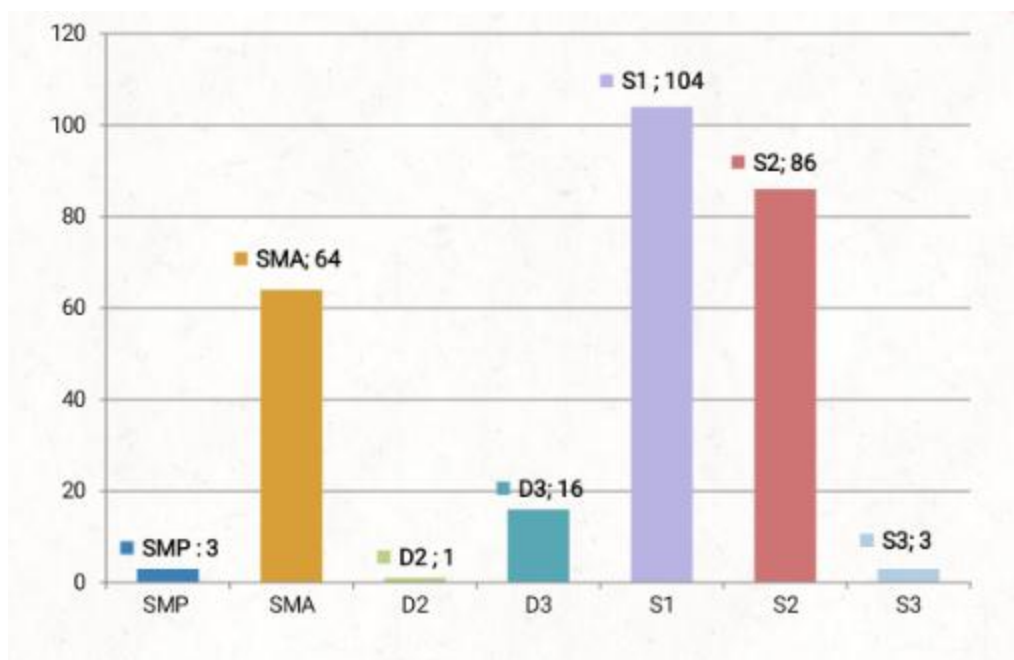
Gambar 1
Komposisi Aparatur Sekretariat Wakil Presiden Berdasarkan Status (PNS dan Tenaga Perbantuan)



Gambar 2
Komposisi Aparatur Sekretariat Wakil Presiden Berdasarkan Jenis Kelamin per Desember 2018



Gambar 3
Komposisi Aparatur Sekretariat Wakil Presiden
Berdasarkan Tingkat Pendidikan per Desember 2018



1.5. Mandat dan Peran Strategis

Wakil Presiden periode 2014-2019 mendapat tugas dari Presiden untuk menangani hal tertentu, yang secara garis besar meliputi isu di bidang reformasi birokrasi, otonomi daerah, penanggulangan bencana, penanggulangan kemiskinan, serta prestasi olahraga, kepemudaan dan pariwisata. Dalam menjalankan tugas tersebut di atas, Wakil Presiden dibantu oleh Sekretariat Wakil Presiden yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi, serta analisis yang prima kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menjalankan pemerintahan.

Terkait dengan penugasan dari Presiden, Wakil Presiden selama tahun 2018 menjabat selaku:

- a. Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K);

TNP2K yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, merupakan wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat, yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan. Tugas pokok TNP2K antara lain (1) menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; (2) melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga; serta (3) melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

- b. Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN)

Presiden Joko Widodo membentuk KPRBN pada 18 Mei 2015 melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 2015-2019. Pembentukan komite tersebut untuk mengawal kesinambungan pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 2015-2025. Sesuai peran strategisnya, Wakil Presiden beberapa kali telah memimpin langsung rapat pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di seluruh kementerian/lembaga terkait serta kendala pelaksanaannya di pusat dan daerah.

c. Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah menjelaskan bahwa DPOD dibentuk dalam rangka (1) mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. DPOD mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan yang meliputi: (a) penataan daerah; (b) dana dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus; (c) dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; dan (d) penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan/atau perselisihan antara daerah dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Tahun 2018, DPOD menyelenggarakan rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden dalam menentukan kebijakan pemerintah terkait penataan daerah dan dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

d. Ketua Dewan Pariwisata Nasional

Dasar hukum penetapannya adalah Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategi Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata.

e. Ketua Pengarah Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XXVIII Tahun 2018

Dasar hukum penetapannya adalah Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XXVIII Tahun 2018.

f. Komandan Penanganan Korban Bencana Gempa dan Tsunami di Kota Palu, Kab. Donggala, Kab. Sigi, dan Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Beberapa hal yang menjadi prioritas penanganan bencana di bawah komando Wakil Presiden adalah (1) evakuasi, pencarian, dan penyelamatan korban yang belum ditemukan; (2) penyediaan tenda besar untuk para pengungsi di Kota Palu, Kab. Donggala, Kab. Sigi, dan Kab. Parigi Moutong; (3) memastikan tersedianya bahan makanan dan kebutuhan untuk wanita, bayi, dan

anak; serta (4) perbaikan infrastruktur, khususnya bandara udara, jalan yang terkena longsor, dan listrik.

g. Ketua Palang Merah Indonesia (PMI)

Pada Musyawarah Nasional Palang Merah Indonesia (Munas PMI) ke-20 di Jakarta pada tanggal 15-18 Desember 2014, memilih kembali Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum PMI periode 2014 s.d. 2019.

h. Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI)

Pada Mukhtamar Dewan Masjid Indonesia (DMI) ke-7 di Jakarta pada tanggal 10-12 November 2017, memilih kembali Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai Ketua DMI periode 2017 s.d. 2022.

i. Ketua Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, dan wilayah terdampak lainnya.

Dasar hukum penetapannya adalah Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 2018 tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, dan wilayah terdampak lainnya.

1.6. Permasalahan Utama

Berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015, Sekretariat Wakil Presiden mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi, serta analisis yang prima kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menjalankan pemerintahan. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam rangka melaksanakan pencapaian kinerja, yaitu:

- a. Kuantitas sumber daya manusia Sekretariat Wakil Presiden sangat terbatas. Formasi lengkap berjumlah 657 orang, namun hanya terisi 361 orang (54,95%).
- b. Proses kerja di lingkup Sekretariat Wakil Presiden belum seluruhnya mengoptimalkan teknologi informasi dalam memberikan dukungan data, informasi, dan analisis kebijakan kepada Wakil Presiden.

Dalam rangka memberikan dukungan data, informasi, dan analisis kebijakan di bidang ekonomi, infrastruktur, kemaritiman; pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan; serta pemerintahan; telah ditempuh melalui pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintah di kementerian/lembaga atau pemerintah daerah, dan penyerapan pandangan dari berbagai kalangan tentang isu terkait melalui kegiatan rapat atau diskusi terfokus. Namun, proses mendokumentasikan data, informasi, dan analisis kebijakan pada tiap unit kerja masih belum sepenuhnya memanfaatkan *database digital* atau masih dilakukan manual, yang menyebabkan

proses kerja berjalan lambat, tidak *up-to-date* dan hasil analisis terlewat serta tidak memiliki nilai guna bagi Wakil Presiden;

- c. Proses input data pada aplikasi membutuhkan waktu yang lama dan belum terintegrasinya sistem informasi menyulitkan penyajian data serta informasi yang cepat, akurat, dan responsif sebagai bahan pengambilan keputusan atau kebijakan pimpinan.
- d. Kebijakan efisiensi anggaran dan penyesuaian lokus serta fokus kegiatan penyerapan pandangan pada kedeputan substansi menyebabkan terbatasnya data dukung analisis kebijakan.

1.7. Sistematika Penulisan Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Bab I – Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum Sekretariat Wakil Presiden dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

Bab II – Perencanaan Kinerja

Menguraikan ikhtisar Perjanjian Kinerja Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2018.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja dan realisasi penggunaan anggaran Sekretariat Wakil Presiden dikaitkan dengan pertanggungjawaban dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2018.

Bab IV – Penutup

Memaparkan simpulan umum atas capaian kinerja Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2018 serta langkah yang akan dilakukan Sekretariat Wakil Presiden dalam rangka meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2015-2019

Sekretariat Wakil Presiden menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi yang dituangkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2015-2019 sebagai pedoman menjalankan tugas dan fungsinya memberikan dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan dan keprotokolan, serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara selama jangka waktu lima tahun.

Visi Sekretariat Wakil Presiden

Sekretariat Wakil Presiden menetapkan visi dalam rangka mengantisipasi kondisi lingkungan strategis yang penuh tantangan dan harapan di masa mendatang, serta dalam rangka memantapkan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Wakil Presiden yang andal dalam memberikan pelayanan kepada Wakil Presiden dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Andal mengandung arti suatu kondisi dimana seluruh unsur dalam Sekretariat Wakil Presiden dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan tanpa kesalahan (*zero mistake*).

Misi Sekretariat Wakil Presiden

Sekretariat Wakil Presiden menetapkan misi dalam rangka mewujudkan visinya, antara lain:

- a. memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
- b. memberikan pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang optimal kepada Wakil Presiden; dan
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana Sekretariat Wakil Presiden.

Tata Nilai Sekretariat Wakil Presiden

Sekretariat Wakil Presiden merumuskan nilai-nilai sebagai ukuran yang mengandung kebenaran dan kebaikan tentang keyakinan juga perilaku organisasi yang dianut serta digunakan

sebagai budaya kerja organisasi dalam pengambilan keputusan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden dengan mengacu kepada visi dan misi.

Penetapan nilai-nilai Sekretariat Wakil Presiden dalam rangka mewujudkan visi dan misi memberikan dasar sekaligus sikap juga perilaku seluruh aparatur dalam menjalankan tugas sehari-hari serta menyatukan hati dan pikiran seluruh aparatur.

a. profesional

memiliki wawasan yang luas dan dapat memandang masa depan, memiliki kompetensi di bidangnya, mengembangkan potensi dan kapasitas diri, etos kerja berprestasi, serta menjunjung tinggi etika profesi;

b. transparan

membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

c. akuntabel

setiap kegiatan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan tanggung gugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. prima

sebagai yang utama, sempurna atau sangat baik, memuaskan, dan juga bermakna kesanggupan untuk menyelesaikan tugas tanpa kesalahan (*zero mistake*), aman serta mampu memelihara keseimbangan antara keterbukaan informasi publik dengan kerahasiaan negara;

e. integritas

mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi serta kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran;

f. efektif

setiap usaha dan tindakan yang dilakukan dapat berhasil guna;

g. efisien

mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, serta biaya.

Tujuan Sekretariat Wakil Presiden

Sekretariat Wakil Presiden merumuskan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan strategis untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi.

Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang dukungan kebijakan ekonomi, infrastruktur, dan kemaritiman; pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan; serta pemerintahan yang berkualitas kepada Wakil Presiden	1. Persentase hasil dukungan teknis dan administrasi serta analisis kebijakan di bidang dukungan kebijakan ekonomi, infrastruktur, dan kemaritiman; pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan; serta pemerintahan yang berkualitas kepada Wakil Presiden	100%
	2. Indeks pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Wakil Presiden	4,44

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sekretariat Wakil Presiden

Penetapan sasaran strategis mempunyai peranan penting dalam memberikan fokus pada penyusunan kegiatan-kegiatan bersifat spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Indikator kinerja sasaran strategis yang termuat dalam Rencana Strategis Sekretariat Wakil Presiden terdiri atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja lainnya Sekretariat Wakil Presiden. Sekretariat Wakil Presiden menetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja melalui kajian yang menyeluruh.

Tabel 2.2
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1. Meningkatnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam mendukung tugas Wakil Presiden	IKU1: Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden
2. Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Wakil Presiden	IKU2: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden
	IKU3: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden
	IK4: Persentase kegiatan pers, media, dan pelayanan informasi serta dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan acara lainnya di lingkungan Sekretariat Wakil

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
	Presiden yang diselesaikan
	IK5: Persentase kegiatan pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan
	IK6: Jumlah laporan program, anggaran dan keuangan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang disusun
	IK7: Jumlah laporan pengelolaan dana operasional Wakil Presiden

Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Wakil Presiden

Arah kebijakan dan strategi Sekretariat Wakil Presiden memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Sekretariat Wakil Presiden, serta dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Arah kebijakan dan strategi Sekretariat Wakil Presiden meliputi:

- meningkatkan kualitas dukungan teknis, administrasi, serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden;
- meningkatkan kualitas dukungan administrasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Sekretariat Wakil Presiden, mencakup kualitas pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan serta dukungan manajemen kepada Wakil Presiden;
- meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur Sekretariat Wakil Presiden; dan
- meningkatkan kualitas kompetensi serta pembinaan aparatur.

Program Sekretariat Wakil Presiden

Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Wakil Presiden pada tahun 2018 adalah:

- Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Sekretariat Negara.
- Program penyelenggaraan pelayanan dukungan kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

2.2. Perjanjian Kinerja Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2018

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja menciptakan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi, wewenang, serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi juga kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya dalam rangka menjaga kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja adalah:

- a. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan serta sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan juga sanksi;
- d. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
- e. sebagai dasar dalam penetapan sasaran strategis.

Sekretariat Wakil Presiden menyusun perjanjian kinerja tahun 2018 disusun di awal tahun 2018 dengan mengacu kepada Rencana Strategis Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2015-2019. Hasil dari pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kinerja, ditindaklanjuti dengan merevisi Perjanjian Kinerja Tahun 2018, berdasarkan:

- a. Keputusan Kepala Sekretariat Wakil Presiden Nomor 14 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden
- b. Memorandum Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Nomor M-100/Ses/PR.00.03/03.2018, tanggal 6 Maret 2018, hal Penetapan Penyesuaian Alokasi Anggaran TA 2018 untuk Pemenuhan Belanja Operasional Pegawai Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2018;

- c. Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA) dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Kementerian Sekretariat Negara (BA 007) tanggal 24 Juli 2018.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam mendukung tugas Wakil Presiden	IKU1: Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%
2. Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Wakil Presiden	IKU2: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden	4,44
	IKU3: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden	4,44
	IK4: Persentase kegiatan pers, media, dan pelayanan informasi serta dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan acara lainnya di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan	100%
	IK5: Persentase kegiatan pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan	100%
	IK6: Jumlah laporan program, anggaran dan keuangan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang disusun	2 Dokumen
	IK7: Jumlah laporan pengelolaan dana operasional Wakil Presiden	1 Dokumen
Program: 1. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Sekretariat Negara 2. Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden		

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Sekretariat Wakil Presiden

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Wakil Presiden tahun 2018 dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja sasaran yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Sekretariat Wakil Presiden yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian kinerja Sekretariat Wakil Presiden. Capaian kinerja sasaran menginformasikan kinerja, berupa *outcome* pada tahun 2018.

Capaian Kinerja Sasaran

Perhitungan realisasi dilakukan dengan menggunakan formula yang berbeda-beda untuk masing-masing indikator kinerja sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Sekretariat Wakil Presiden

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja & Formulasi Perhitungan
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam mendukung pelaksanaan tugas Wakil Presiden	IKU1: Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden Formulasi: $\frac{\text{jumlah hasil analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden}}{\text{jumlah hasil analisis kebijakan yang disampaikan kepada Wakil Presiden}} \times 100\%$ Tipe Perhitungan: Kumulatif Sumber Data: Dokumentasi hasil kegiatan antara lain: 1. Memorandum/laporan hasil analisis/hasil kajian 2. Bahan sambutan/audiensi/rapat/kunjungan kerja Wakil Presiden 3. Memorandum penanganan informasi publik/masyarakat 4. Laporan penyerapan pandangan 5. Laporan perkembangan kegiatan 6. Buku agenda tata usaha pimpinan Kepala Sekretariat Wakil Presiden 7. Agenda/Jadwal Acara Harian Wakil Presiden Penjelasan: Analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden adalah hasil analisis berupa memorandum, laporan, dan bahan sambutan/audiensi/rapat/kunjungan kerja Wakil Presiden yang disampaikan oleh seluruh Deputi substansi dan disetujui/direspon oleh Wakil Presiden baik yang terdokumentasikan secara manual dalam buku agenda tata usaha pimpinan Kepala Sekretariat Wakil Presiden maupun elektronik.
Sasaran Strategis 2: Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan	IKU2: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja & Formulasi Perhitungan
dan keprotokolan yang berkualitas kepada Wakil Presiden	Formulasi: Dilakukan melalui survei untuk mengukur kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden, dengan responden perangkat melekat dengan Wakil Presiden Tipe Perhitungan: Non kumulatif Sumber Data: Hasil survei Penjelasan: Jenis pelayanan kerumahtanggaan meliputi: 1. Jamuan 2. Dekorasi 3. Natura jamuan dan kebersihan 4. Perawatan linen Perangkat melekat antara lain: 1. Kepala Sekretariat Wakil Presiden 2. Deputi Bidang Administrasi 3. Para pejabat/pegawai Biro Protokol 4. Sekretaris Pribadi Wakil Presiden 5. Ajudan Wakil Presiden
	IKU3: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden Formulasi: Dilakukan melalui survei untuk mengukur kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden, dengan responden perangkat melekat dengan Wakil Presiden Tipe Perhitungan: Non kumulatif Sumber Data: Hasil survei Penjelasan: Jenis pelayanan keprotokolan meliputi: 1. Penyiapan acara harian Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden 2. Penyiapan acara kunjungan kerja Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden ke daerah 3. Penyiapan acara kunjungan kerja Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden ke luar negeri 4. Penyiapan dan pelaksanaan rapat/sidang yang dipimpin oleh Wakil Presiden 5. Pengelolaan naskah pidato/notulen dan penerjemahan yang terkait dengan kegiatan Wakil Presiden Perangkat melekat antara lain: 1. Kepala Sekretariat Wakil Presiden 2. Para Deputi di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden 3. Staf Khusus Wakil Presiden 4. Sekretaris Pribadi Wakil Presiden 5. Ajudan Wakil Presiden 6. Dokter Pribadi Wakil Presiden 7. Para pejabat/pegawai Biro Protokol 8. Tim Notulis Wakil Presiden 9. Pengemudi rangkaian 10. Pasukan Pengamanan Presiden Grup B 11. Para pejabat/pegawai pada Bidang Peliputan dan Dokumentasi 12. Para pejabat/pegawai pada Subbagian Ketertiban dan Keamanan Dalam

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja & Formulasi Perhitungan
	IK4: Persentase kegiatan pers, media, dan pelayanan informasi serta dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan acara lainnya di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan Formulasi: $\frac{\text{jumlah kegiatan pers, media, dan pelayanan informasi serta dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan acara lainnya di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan}}{\text{jumlah kegiatan pers, media, dan pelayanan informasi serta dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan acara lainnya di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden}} \times 100\%$ Tipe Perhitungan: Kumulatif Sumber Data: Laporan dan dokumen kegiatan dokumentasi dan diseminasi informasi kegiatan Wakil Presiden dan Sekretariat Wakil Presiden
	IK5: Persentase kegiatan pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan Formulasi: $\frac{\text{jumlah kegiatan pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan}}{\text{jumlah kegiatan pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden}} \times 100\%$ Tipe Perhitungan: Kumulatif Sumber Data: Laporan dan dokumen kegiatan pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden
	IK6: Jumlah laporan program, anggaran dan keuangan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang disusun Formulasi: Jumlah laporan program, anggaran dan keuangan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang disusun Tipe Perhitungan: Kumulatif Sumber Data: Rencana Kerja Sekretariat Wakil Presiden dan Laporan Kinerja Sekretariat Wakil Presiden
	IK7: Jumlah laporan pengelolaan dana operasional Wakil Presiden Formulasi: Jumlah laporan pengelolaan dana operasional Wakil Presiden Tipe Perhitungan: Kumulatif Sumber Data: Laporan pengelolaan dana operasional Wakil Presiden

Pencapaian kinerja masing-masing indikator kinerja merupakan tanggung jawab seluruh kedeputian di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja. Berikut tabel daftar penanggung jawab masing-masing indikator kinerja.

Tabel 3.2
Daftar Penanggung Jawab Masing-masing Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam mendukung pelaksanaan tugas Wakil Presiden	IKU1: Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	1. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman 2. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan 3. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan
2	Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Wakil Presiden	IKU2: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden	Deputi Bidang Administrasi
		IKU3: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden	Deputi Bidang Administrasi
		IK4: Persentase kegiatan pers, media, dan pelayanan informasi serta dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan acara lainnya di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan	Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan
		IK5: Persentase kegiatan pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan	Deputi Bidang Administrasi
		IK6: Jumlah laporan program, anggaran, dan keuangan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden	Deputi Bidang Administrasi
		IK7: Jumlah laporan pengelolaan dana operasional Wakil Presiden	Deputi Bidang Administrasi

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan kedeputian sepanjang tahun 2018, diperoleh hasil pengukuran capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam mendukung pelaksanaan tugas Wakil Presiden	IKU1: Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100% (365 laporan)	100%
2	Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Wakil Presiden	IKU2: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden	4,44	5,32	100%
		IKU3: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden	4,44	5,28	100%
		IK4: Persentase kegiatan pers, media, dan pelayanan informasi serta dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan acara lainnya di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan	100%	100% (2.910 kegiatan)	100%
		IK5: Persentase kegiatan pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan	100%	100% (53.572 kegiatan)	100%
		IK6: Jumlah laporan program, anggaran, dan keuangan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		IK7: Jumlah laporan pengelolaan dana operasional Wakil Presiden	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Tabel 3.3 di atas menjelaskan bahwa berdasarkan hasil perhitungan formulasi masing-masing indikator kinerja menghasilkan capaian sebagai berikut:

- IKU1 menghasilkan 365 hasil analisis yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden (100%);
- IKU2 dengan nilai indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan adalah 5,32 (100%), mutu pelayanan A, dan kinerja pelayanan Sangat Baik;

- IKU3 dengan nilai indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan adalah 5,28 (100%), mutu pelayanan A, dan kinerja pelayanan Sangat Baik;
- IK4 menghasilkan 2.910 kegiatan pers, media, dan pelayanan informasi serta dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan acara lainnya di Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan (100%);
- IK5 menghasilkan 53.572 kegiatan pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan (100%);
- IK6 menghasilkan dua dokumen laporan program, anggaran, dan keuangan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang disusun, yaitu Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2018 dan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2017 (100%); dan
- IK7 menghasilkan satu dokumen laporan pengelolaan dana operasional Wakil Presiden, yaitu Laporan Pengelolaan Dana Operasional dan Bantuan (DOB) Wakil Presiden Tahun 2018 (100%).

Dengan demikian, capaian kinerja Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2018 secara keseluruhan mencapai 100%.

Analisis Capaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS 1:

Meningkatnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam mendukung pelaksanaan tugas Wakil Presiden

IKU1: Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1 merupakan kontribusi dari kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU1 Sekretariat Wakil Presiden, yaitu hasil analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden. Yang dimaksud dengan hasil analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden adalah hasil analisis berupa memorandum, laporan, dan bahan sambutan/audiensi/rapat/kunjungan kerja Wakil Presiden yang disampaikan oleh seluruh Deputi substansi dan disetujui/direspon oleh Wakil Presiden baik yang terdokumentasikan secara manual dalam buku agenda tata usaha pimpinan Kepala Sekretariat Wakil Presiden maupun elektronik.

a) Capaian Kinerja *Output*

Pada tahun 2018, capaian kinerja IKU ini sebesar 100%, yaitu terdapat 365 hasil analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang harus dianalisis dan seluruhnya telah selesai dianalisis dengan rincian sebagai berikut:

- laporan analisis kebijakan di bidang ekonomi, infrastruktur, dan kemaritiman sebanyak 76 hasil analisis;

- laporan analisis kebijakan di bidang pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan sebanyak 114 hasil analisis; dan
- laporan analisis kebijakan di bidang pemerintahan sebanyak 176 hasil analisis.

b) **Capaian Kinerja *Outcome***

Pada tahun 2018, capaian *outcome* IKU ini sebesar 100%, yaitu terdapat 365 hasil analisis yang telah ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden sebagai bahan pengambilan keputusan.

Beberapa hasil analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden sebagai bahan pengambilan keputusan adalah:

1. Perkembangan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua ASN tanggal 3 April 2018

RPP Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua merupakan salah satu aturan teknis turunan dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang menjadi prioritas pemerintah karena telah melebihi batas waktu penyusunannya. Terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan keputusan pemerintah, antara lain: (a) penetapan skema pembayaran manfaat pensiun dan JHT. Diusulkan manfaat pensiun diberikan bulanan (*anuitas*, sedangkan manfaat JHT terdiri dari 50% *lumpsum* dan 50% *anuitas* sebagai penambah manfaat pensiun (b) penetapan tanggal *cut off* (mulai berlakunya sistem baru) (c) perlu pertimbangan *cost sharing* APBN dan APBD untuk beban pensiun dan JHT oleh pemerintah (d) kajian dan penetapan badan pengelola dana pensiun dan JHT ASN; serta (e) hal teknis lain terkait skema iuran pasti (*defined contribution*) untuk ASN baru.

2. Analisis tentang Penanganan Darurat Bencana Gempa Lombok, tanggal 20 Agustus 2018

Analisis tentang situasi dan kondisi bencana gempa Lombok. Analisis memuat arahan Presiden yang harus segera ditindaklanjuti, jumlah korban bencana gempa dan sebarannya, jumlah bantuan pemerintah yang harus segera didistribusikan kepada para korban gempa, kendala yang dihadapi dalam proses pendistribusian logistik bantuan kepada korban bencana, kebutuhan logistik para korban gempa yang mendesak untuk segera dipenuhi, serta peta sebaran gempa susulan. Analisis digunakan sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan Wakil Presiden dalam rangka memimpin rapat penanganan darurat bencana gempa Lombok oleh pihak-pihak terkait.

3. Laporan Hasil Rapat Koordinasi tentang Luas Lahan Baku Sawah dan Lahan Padi tanggal 31 Juli 2018

Rapat dilaksanakan dalam rangka perbaikan data produksi beras nasional, khususnya laporan lembaga terkait mengenai luas lahan baku sawah dan lahan padi yang akan dijadikan dasar penentuan produksi beras nasional. Pokok-pokok simpulan rapat, antara lain: (a) pada tanggal 18 Agustus 2018, Kementerian Agraia dan Tata Ruang/BPN akan menyampaikan hasil validasi lapangan luas lahan baku sawah di 8 Provinsi, sebagai bahan penyempurnaan data luas lahan baku sawah hasil verifikasi Badan Informasi dan Geospasial (BIG); (b) data luar bahan baku sawah nasional tahun 2018 disepakati berupa data hasil verifikasi BIG pada 15 provinsi, yang disempurnakan dengan hasil validasi lapangan oleh Kementerian ATR/BPN bersama Tim Pengumpulan Data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di 8 Provinsi. Sementara luas lahan baku sawah di 18 provinsi menggunakan luas lahan baku sawah yang telah dikoreksi oleh Kementerian ATR/BPN tahun 2013; (c) dalam penentuan produksi beras nasional, BPS akan menggunakan luas lahan baku sawah yang telah terverifikasi dan disahkan oleh Kementerian ATR/BPN. Terhadap daerah yang luas lahan sawahnya berkurang signifikan akan dilakukan verifikasi lanjutan dan terhadap daerah yang luas lahan sawahnya bertambah signifikan akan menambah jumlah sampel Kerangka Sampel Area (KSA); serta (d) BPS meminta waktu untuk mengumumkan produksi beras nasional pada bulan September 2018.

4. Inflasi Bulanan Tahun 2018

Laporan inflasi bulanan memuat analisis kebijakan atas perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik setiap bulannya selama Tahun 2018. Data dan informasi yang tercantum pada laporan ini antara lain tingkat inflasi/deflasi yang terjadi di setiap kota di Indonesia, data kota yang mengalami inflasi dan deflasi; faktor yang mengakibatkan terjadinya inflasi/deflasi; tingkat inflasi tahun kalender berjalan dan tingkat inflasi tahun ke tahun; inflasi komponen inti, inflasi inti tahun ke tahun; andil dan tingkat inflasi bulan berjalan, inflasi tahun kalender berjalan, dan inflasi tahun ke tahun menurut kelompok pengeluaran; andil dan tingkat inflasi bulan berjalan menurut kelompok komponen dan komponen energi; serta perkembangan tingkat inflasi bulan ke bulan selama Tahun 2018.

c) **Faktor Pendukung Keberhasilan**

Keberhasilan pencapaian kinerja pada IKU ini dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- dukungan SDM yang memiliki komitmen tinggi dalam menyelesaikan setiap pekerjaan walaupun jumlahnya terbatas;
- tersedianya data dukung sebagai bahan penyusunan analisis kebijakan di bidang ekonomi, infrastruktur, dan kemaritiman, pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan, serta pemerintahan.
- terjalinnya koordinasi dan kerja sama yang baik dengan Kementerian/Lembaga/Pemda dan pihak-pihak terkait lainnya, sehingga mendukung proses pengumpulan data dukung penyusunan analisis kebijakan;

Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut di atas adalah sebesar Rp 2.194.866.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.124.248.618,00 (96,78%).

SASARAN STRATEGIS 2:

Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Wakil Presiden

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2 diukur dengan menggunakan enam indikator kinerja, yaitu IKU2, IKU3, IK4, IK5, IK6, dan IK7 Sekretariat Wakil Presiden. Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut di atas adalah sebesar Rp 227.177.038.000, 00 dengan realisasi sebesar Rp 211.388.459.054,00 (93,05%). Adapun capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja tersebut adalah:

IKU2: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden

a) Capaian Kinerja *Output*

Capaian *output* IKU ini adalah 100%, yaitu dari target 1.351 kegiatan yang termasuk lingkup pelayanan kerumahtanggaan, seluruhnya dapat dilaksanakan. Pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden meliputi beberapa kegiatan sebagaimana diuraikan dalam pada tabel 3.4 di bawah.

Tabel 3.4
Kegiatan Dukungan Layanan Kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden Tahun 2018

Nama Kegiatan	Jumlah Kegiatan
Penyediaan dan pelayanan jamuan acara kenegaraan (Wakil Presiden, Istri/Suami Wakil Presiden, tamu negara, dan kegiatan penting lainnya) serta jamuan operasional lainnya	1.040
Penyiapan dekorasi dalam rangka acara Wakil Presiden, Istri/Suami Wakil Presiden dan kegiatan kenegaraan lainnya	241

Melaksanakan pagelaran kesenian pada acara tamu negara dan acara-acara kenegaraan lainnya	6
Pemeliharaan dan penyiapan peralatan/perlengkapan acara tamu negara/resmi/penting lainnya/upacara/kesekretariatan	64
TOTAL	1.351

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Dalam penyusunan indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan (IKP) kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden dari perangkat melekat dengan Wakil Presiden. Kuesioner disusun berdasarkan tujuan survei terhadap tingkat kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden.

Seluruh kuesioner dalam survei ini menggunakan pernyataan tertutup dan diukur dengan menggunakan skala *Likert*. Penggunaan skala *Likert* dengan 6 (enam) skala pengukuran adalah untuk menghindari jawaban netral dan ragu-ragu dari responden. Dalam menjawab kuesioner ini, responden diminta persetujuannya berdasarkan pernyataan yang tertera pada masing-masing kuesioner, sebagai berikut:

Tabel 3.5
Tabel Nilai Skala Likert Yang digunakan pada Kuesioner

No	Pernyataan	Nilai Pertanyaan
1	Sangat Tidak Setuju (STS)	1
2	Tidak Setuju (TS)	2
3	Agak Tidak Setuju (ATS)	3
4	Agak Setuju (AS)	4
5	Setuju (S)	5
6	Sangat Setuju (SS)	6

Responden dalam survei ini adalah perangkat melekat dengan Wakil Presiden yang terdiri dari: Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Deputi Bidang Administrasi, para pejabat/pegawai Biro Protokol, Ajudan Wakil Presiden, dan Sekretaris Pribadi Wakil Presiden.

Metode Pengolahan Data

Nilai indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan (IKP) kerumahtanggaan dihitung dengan menggunakan “**nilai rata-rata tertimbang**” masing-masing pernyataan pelayanan. Dalam penghitungan IKP kerumahtanggaan terhadap 6 pernyataan yang dikaji, setiap pernyataan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai Rata – Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Pernyataan}} = \frac{1}{21} = 0,048$$

$$= 1/6 = 0,167$$

Untuk memperoleh nilai IKP kerumahtanggaan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKP} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Pernyataan}}{\text{Total Pernyataan yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKP yaitu antara 25 – 150, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKP Pernyataan Pelayanan} \times 25$$

Tabel 3.6
Nilai Persepsi, Interval IKP, Interval Konversi IKP, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Pelayanan untuk Pelayanan Kerumahtanggaan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKP	Nilai Interval Konversi IKP	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1	1,00 – 1,83	25 – 45,75	F	Sangat Tidak Baik
2	1,84 – 2,66	46 – 66,5	E	Tidak Baik
3	2,67 – 3,49	66,75 – 87,25	D	Agak Tidak Baik
4	3,50 – 4,32	87,5 – 108	C	Agak Baik
5	4,33 – 5,15	108,25 – 128,75	B	Baik
6	5,16 – 6,00	129 – 150	A	Sangat Baik

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan (IKP) kerumahtanggaan, jumlah dari setiap pernyataan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap pernyataan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap pernyataan merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap pernyataan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,167.

Tabel 3.7
Nilai Rata-rata Tiap Pernyataan

No.	Pernyataan	Nilai Pernyataan
1	Cita rasa jamuan sesuai permintaan	5,32
2	Dekorasi acara yang serasi	5,17
3	Pelayanan prima dari persiapan hingga akhir acara	5,41

No.	Pernyataan	Nilai Pernyataan
4	Menyediakan kebutuhan sesuai dengan selera Wakil Presiden	5,30
5	Siap memenuhi permintaan kelengkapan acara secara mendadak	5,23
6	Kebutuhan kerumahtanggaan kediaman dan kantor Wakil Presiden terpenuhi dengan baik	5,26
	Rata-rata	5,28

Berdasarkan tabel 3.6 di atas menunjukkan bahwa rata-rata jawaban dari responden terhadap kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden secara umum adalah baik. Beberapa hal yang perlu untuk lebih ditingkatkan lagi adalah kompetensi yang memadai, cita rasa jamuan yang sesuai dengan permintaan, dan evaluasi pelayanan secara berkala.

Selanjutnya, untuk mengetahui nilai indeks kelancaran dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$(5,32 \times 0,167) + (5,17 \times 0,167) + (5,41 \times 0,167) + (5,30 \times 0,167) + (5,23 \times 0,167) + (5,26 \times 0,167) = 5,28$$

Nilai indeks adalah **5,28**

Dengan demikian, nilai indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Nilai IKP setelah dikonversi = Nilai Indeks X Nilai Dasar = $5,28 \times 25 = 132$.
- Mutu pelayanan **A**.
- Kinerja pelayanan **Sangat Baik**.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian kinerja pada IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung sebagai berikut:

- Perencanaan yang baik atas anggaran dan kegiatan pelayanan kerumahtanggaan sehingga semua kegiatan yang telah direncanakan dapat diselesaikan dengan baik sesuai jadwal yang telah dibuat sebelumnya;
- Sumber Daya Manusia yang tersedia memiliki komitmen yang tinggi dalam memenuhi target kinerja yang telah direncanakan;
- adanya Standar Operasional Prosedur dalam melaksanakan pekerjaan khususnya untuk kegiatan-kegiatan Wakil Presiden yang penugasannya mendadak; serta
- koordinasi yang intensif baik dengan pihak internal maupun dengan pihak eksternal yaitu Kementerian/Lembaga/Pemda dan pihak terkait lainnya.

Anggaran yang disediakan untuk mencapai IKU tersebut di atas seluruhnya sebesar Rp 7.147.989.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp 6.945.537.251,00 (97,17%).

IKU3: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden

a) Capaian Kinerja *Output*

Capaian *output* IKU ini adalah 100%, yaitu dari 1.434 kegiatan yang termasuk lingkup pelayanan keprotokolan, seluruhnya dapat dilayani. Pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden meliputi beberapa kegiatan seperti yang dijelaskan pada tabel 3.7 dan tabel 3.8 berikut ini.

Tabel 3.8
Kegiatan Dukungan Layanan Keprotokolan
kepada Wakil Presiden Tahun 2018

Kegiatan Wakil Presiden	Jumlah Kegiatan
Kunjungan Tamu Negara	5
Kunjungan ke Luar Negeri	10
Kunjungan Kerja ke Daerah	99
Acara di Pusat (Jakarta)	344
Kunjungan Kehormatan/Audiensi	361
TOTAL	819

Tabel 3.9
Layanan Keprotokolan kepada Wakil Presiden

Kegiatan Wakil Presiden	Jumlah Kegiatan
Penyiapan acara harian Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden	365
Penyiapan acara kunjungan kerja Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden ke daerah	99
Penyiapan acara kunjungan kerja Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden ke luar negeri	10
Penyiapan dan pendistribusian undangan acara Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden	72
Penyiapan dan pelaksanaan rapat/sidang yang dipimpin oleh Wakil Presiden	69
TOTAL	615

Beberapa kegiatan layanan keprotokolan kepada Wakil Presiden tahun 2018 adalah:

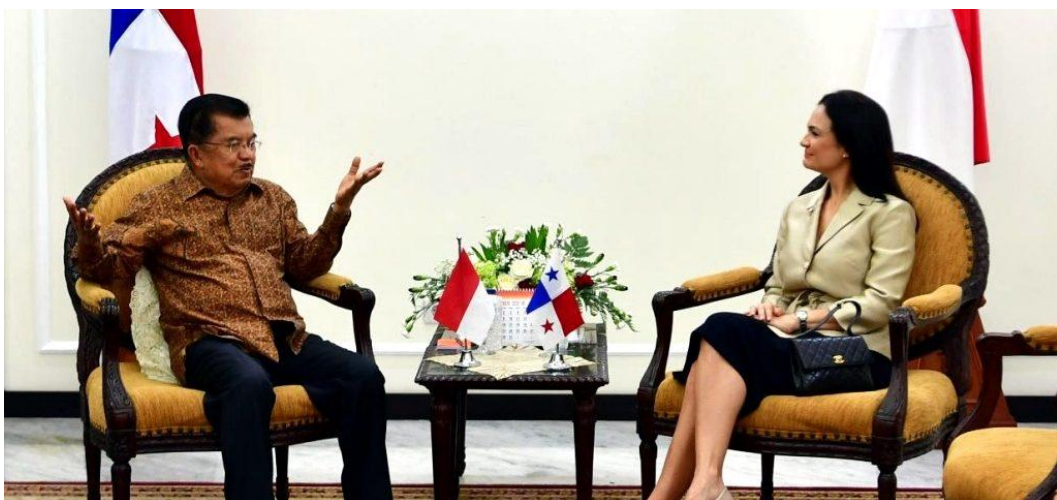
1. Kunjungan Tamu Negara

Kunjungan Wakil Presiden Panama Isabel de Saint Malo de Alvarado, di Kantor Wakil Presiden 26 Oktober 2018.

Kunjungan Wakil Presiden Panama beserta rombongan menjadi kunjungan pertama pejabat tinggi Panama yang datang ke Indonesia sejak dibukanya hubungan diplomatik kedua negara di tahun 1979. Kunjungan bertujuan untuk lebih dekat dengan negara-negara Afrika, Timur Tengah dan Asia, termasuk Indonesia dalam rangka meningkatkan nilai perdagangan kedua Negara. Berdasarkan data, pada tahun 2017 nilai perdagangan bilateral mencapai 129,9 juta USD. Selain itu, investasi Panama di Indonesia mencapai peringkat ke-17 dari 117 negara. Terkait kerjasama di bidang maritim, Konferensi Samudera Dunia (Our Ocean Conference) 2018 di Bali, yang juga akan dihadiri Wakil Presiden Panama, nantinya diharapkan dapat memberikan peluang bagi negara-negara yang hadir untuk meningkatkan kerjasama terutama di bidang maritim. Di tengah situasi global yang penuh dengan ketidakpastian ini, hubungan negara-negara di dunia, baik dalam kawasan maupun antar kawasan menjadi sangat penting. Dalam mendukung kelancaran perdagangan dunia, maka konektivitas menjadi hal yang utama apalagi sebagai negara maritim, laut menjadi medium yang memudahkan konektivitas tersebut. Panama yang terkenal dengan Terusan Panama-nya, memberikan peluang sebagai penghubung (*hub*) bagi negara-negara lain dalam meningkatkan perdagangan.

Gambar 4.1

Pertemuan dengan Wakil Presiden Panama pada 26 Oktober 2018



- Kunjungan kehormatan Presiden Pemerintahan Revolusioner Zanzibar Ali Mohamed Shein di Kantor Wakil Presiden, 1 Agustus 2018.

Zanzibar adalah sebuah daerah semi-otonom, bagian dari Tanzania. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan bahwa Indonesia siap meningkatkan kerjasama dengan Tanzania terutama dalam hal perdagangan dan peningkatan kapasitas. Salah satunya melalui pembentukan *Preferential Trade Agreement* (PTA) antara Indonesia dan East African Community (EAC) yang salah satu anggotanya adalah Tanzania. PTA tersebut akan membuka peluang peningkatan perdagangan, tidak saja antara kawasan Afrika Timur dengan Indonesia, tetapi juga dengan kawasan ASEAN.

Selain itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengungkapkan bahwa Indonesia siap bekerjasama untuk peningkatan kapasitas Tanzania di berbagai sektor. Salah satunya, dengan mengundang partisipasi dari peserta Tanzania pada International Training for Agricultural Product Development di Malang yang akan di gelar 26 Agustus hingga 2 September 2018. Terkait kerja sama bidang perikanan, Wakil Presiden Jusuf Kalla pun mengundang delegasi dari Tanzania untuk ikut serta pada acara Our Ocean Conference (OOC) di Bali tanggal 29 hingga 30 Oktober 2018. Presiden Zanzibar menanggapi Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan menyatakan bahwa kunjungan ke Indonesia ini merupakan sebuah kunjungan yang penting. Dirinya mengapresiasi kerja sama yang selama ini telah terjalin serta mengharapkan tindak lanjut di berbagai bidang. Salah satu bidang yang bisa menjadi fokus untuk kerja sama dengan Indonesia adalah dalam peningkatan produksi pangan, terutama padi. Selain itu, perikanan juga menjadi bidang kerja sama yang potensial, mengingat Zanzibar dan Indonesia sama-sama memiliki karakter wilayah kepulauan. Presiden Shein juga menyampaikan bahwa saat ini pariwisata menjadi sektor berkontribusi besar bagi penerimaan negara. Beliau menyoroti selain perlunya peningkatan kapasitas dalam hal hospitality, perlu juga kerja sama untuk meningkatkan *connectivity*.

Gambar 4.2

Pertemuan dengan Presiden Zanzibar pada 1 Agustus 2018



2. Kunjungan Kerja ke Luar Negeri

- Kunjungan kerja Wakil Presiden ke Amerika Serikat pada tanggal 25 September 2018

Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence di Hotel Lotte New York Palace, Madison Ave, New York. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa pertemuannya membicarakan hubungan baik kedua negara tetap terjaga selama 70 tahun. Di usia hubungan diplomatik tersebut, Wakil Presiden berharap ada peningkatan hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat khususnya peningkatan kerjasama ekonomi bidang perdagangan. Masalah politik hingga ketegangan di Korea hingga konflik di Myanmar dan Afganistan juga turut disinggung dalam pertemuan. Wakil Presiden Mike Pence menyatakan dalam pertemuan itu bahwa pihaknya menginginkan Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim terbesar, harus dapat memainkan peran lebih baik lagi di kancah internasional.

Gambar 4.3

Pertemuan dengan Wakil Presiden Amerika Serikat pada 25 September 2018



- Kunjungan kerja Wakil Presiden menghadiri Sidang Majelis Umum (SMU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York Amerika pada tanggal 27 September 2018

Saat menyampaikan pidato pada sesi debat dalam SMU PBB Ke-73 di General Assembly Hall, New York, Kamis, 27 September 2018, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa masyarakat yang damai, adil, dan berkelanjutan, membutuhkan PBB yang lebih responsif, bertanggungjawab, dan kredibel. Oleh sebab itu, Wakil Presiden menilai bahwa Reformasi PBB sangat diperlukan dan tujuannya jelas agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan hari ini dan esok. Wakil Presiden juga menuturkan bahwa PBB harus diposisikan dengan lebih baik, untuk membantu negara-negara yang menopang perdamaian dan mencapai SDGs. Dunia terus menghadapi tantangan global yang kompleks, di mana ketidakstabilan dan konflik masih merajalela dan mewarnai dunia, seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan ekstrim terus berlanjut, bahkan pemikiran *zero-sum* dan nasionalisme sempit sering berlaku. Di saat seperti ini, sering terjadi kekeliruan yaitu orang menilai bahwa kepemimpinan hanya yang memiliki kekuatan besar atau memiliki kekuatan superhero. Padahal dunia tidak perlu mencari kekuatan dari pahlawan super seperti *Avengers* atau *Justice League*, namun seluruh peserta SMU PBB yang hadir adalah para pemimpin global, secara kolektif kita memiliki kekuatan superhero. Saat ini yang harus dilakukan adalah memanfaatkan kehendak, keberanian, kekuatan, welas-asih, ego, dan kerendahan hati kita masing-masing. Sebagai pemimpin global, muda dan tua, wanita dan pria, harus bekerja bersama untuk saling mendorong dalam mencapai tujuan dan sasaran Perserikatan Bangsa-Bangsa. Wakil Presiden mengapresiasi bahwa tema SUM PBB kali ini secara tepat menangkap apa yang perlu dilakukan oleh komunitas bangsa dan komunitas pemimpin, yakni untuk mengejar kedamaian, kesetaraan,

dan keberlanjutan bagi masyarakat yang membutuhkan kepemimpinan global dan tanggung jawab bersama. Tidak ada kepemimpinan yang efektif tanpa tanggung jawab yang tulus dan sebaliknya. Terdapat beberapa poin-poin penting yang perlu diperhatikan dalam SMU PBB kali ini, antara lain yaitu: Pertama, kepemimpinan global dan tanggung bersama menentukan hasil dari pencarian perdamaian abadi. Karena perdamaian bukan semata-mata tidak ada perang, namun menjaga komitmen untuk damai menjadi yang utama. Kedua, bahwa perdamaian harus menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan. Perdamaian dan pembangunan harus berjalan seiring dan saling menguatkan sehingga perdamaian dapat membawa manfaat bagi masyarakat kita. Karena alasan inilah tujuan pembangunan dan komitmen disepakati. Poin ketiga, menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, demokratis, dan menghormati hak asasi manusia yang merupakan kunci dalam menghadapi tantangan besar ekstremisme dan radikalisme yang keras. Salah satu contoh serangan teroris terakhir di Surabaya, telah menunjukkan bahwa evolusi kekerasan tidak lagi mengenal batas bahkan menggunakan anak-anak sebagai senjata yang tidak akan pernah dibenarkan. Selain itu, Wakil Presiden menekankan bahwa ketidakadilan, eksklusivitas, kemiskinan ekstrim, buta huruf, dan pengangguran kaum muda yang saat ini masih masif harus dimusnahkan. Oleh sebab itu, pendekatan kekuatan keras dan lunak harus ditingkatkan. Untuk alasan ini, Indonesia telah berupaya mengubah undang-undang dan memperkuat pendekatan lunak dalam beradaptasi dengan tantangan-tantangan baru yang terus berubah. Di akhir sambutan, Wakil Presiden memperingatkan kepada negara yang mendukung atau menjadi bagian dari tindakan separatis di negara lain, agar tidak diberi tempat dalam sistem PBB. Karena jelas melanggar prinsip-prinsip PBB.

Gambar 4.4

Pidato pada Sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 27 September 2018



Gambar 4.5

Pidato pada Sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 27 September 2018



- Kunjungan kerja Wakil Presiden ke Buenos Aires Argentina dalam rangka menghadiri KTT G20 pada tanggal 30 November 2018

Wakil Presiden Jusuf Kalla mewakili Pemerintah Indonesia pada KTT G20 di Buenos Aires, Argentina menyatakan bahwa negara-negara anggota G20 harus meningkatkan koordinasi dan sinergi kebijakan makro ekonomi untuk meminimalisir efek *negative spillover*, serta mendorong pengembangan model bisnis digital untuk percepatan pertumbuhan inklusif dan peningkatan distribusi pendapatan. Di tengah pertumbuhan ekonomi global yang masih tidak

merata, proteksionisme dagang, dan persaingan geo-politik yang sedemikian ketat, sebagai forum yang mewakili dua pertiga populasi dunia, anggota G20 harus memiliki komitmen bersama menuju pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat. Meskipun era digital telah mengubah kehidupan, namun pemerintah harus memastikan manfaatnya dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan dan anak-anak. Inisiatif Indonesia yaitu *Inclusive Digital Economy Accelerator Hub*, atau IDEA Hub, telah diakui oleh G20 sebagai platform untuk berbagi informasi dan sarana promosi model bisnis ekonomi digital dan inovasi. Oleh karena itu, sarana promosi model bisnis ekonomi digital harus fokus pada *sharing economy*, peningkatan keterampilan digital tenaga kerja, dan inklusi keuangan. Wakil Presiden meyakini bahwa *digital business models* dapat menciptakan pertumbuhan inklusif peningkatan kesejahteraan dan distribusi pendapatan yang lebih baik. Indonesia juga telah mengimplementasikan beberapa kebijakan terkait, termasuk insentif pajak untuk investasi, dan membuka taman sains dan teknologi, serta memprioritaskan pembangunan teknologi financial. Indonesia sangat optimistis dengan penggunaan teknologi dalam mengangkat kerjasama G20 ke era baru yang lebih tinggi, dan memastikan bahwa kerja sama G20 bermanfaat langsung bagi masyarakat dengan memelihara stabilitas dan keterbukaan ekonomi.

Gambar 4.6

Foto bersama dengan anggota KTT G20 pada 30 November 2018



3. Kunjungan Kerja ke Daerah

- Wakil Presiden memimpin rapat koordinasi tentang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dampak gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) di Kantor Gubernur NTB pada 4 November 2018

Wakil Presiden memberi arahan pada rapat agar rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat harus dipercepat, karena seluruh sistemnya sudah disetujui dan dana juga sudah diberikan. Kesehatan dan keselamatan masyarakat menjadi perhatian utama, karena ada batasan orang bisa hidup dan beraktivitas di tempat pengungsian. Jika masyarakat hidup di pengungsian lebih dari enam bulan maka akan mulai timbul masalah kesehatan dan juga masalah sosial. Pemerintah Daerah beserta segenap pihak yang terlibat harus membuat *time schedule* dan menetapkan target Maret 2019 sudah selesai, sehingga masyarakat dapat kembali menempati rumahnya masing-masing. Kebutuhan produksi aplikator rumah tahan gempa harus dihitung kembali berapa yang dibutuhkan sehingga jumlah produksi dapat disesuaikan. Pelibatan mahasiswa teknik juga harus dimaksimalkan untuk membantu mempercepat pembangunan hunian. Begitu pula pengusaha di daerah, karena selain membantu masyarakat ini juga peluang bisnis yang baik. Menurut Wakil Presiden, semua hambatan bisa diatasi apabila semua pihak aktif terlibat, termasuk juga masyarakat. Masyarakat harus aktif ikut membangun kembali rumahnya, karena konsep yang diinginkan sejak awal oleh pemerintah adalah swakelola. Sebelum memimpin rapat di Kantor Gubernur, Wakil Presiden menyempatkan meninjau proses pembangunan rumah warga di Pengempel Indah Bertais dan berdialog dengan warga dan menanyakan kemajuan dan hambatan yang dialami dalam proses pembangunan.

Gambar 4.7

Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa di NTB



- Wakil Presiden memimpin Rapat Koordinasi Pasca Gempa dan Tsunami di Sulawesi Tengah bersama Sekjen PBB, CEO Bank Dunia, dan ADB, di Bandar Udara Mutiara SIS-AI Jufrie Palu, tanggal 12 Oktober 2018

Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) mengatakan, bahwa Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah bersama dengan Indonesia, terutama sejak menangani bencana di Aceh. Karena itu, ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua lembaga dunia tersebut yang akan membantu dalam melakukan rekonstruksi Palu. Pada rakor tersebut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempresentasikan situasi Palu pada kondisi awal yang menyebabkan kerusakan luar biasa di ibu kota Sulawesi Tengah, hingga kondisi saat ini. Tidak ada elektrik, komunikasi, banyak jenazah, dan rumah sakit tidak dapat beroperasi penuh. Kondisi secara umum di Palu anatara lain banyaknya bangunan pemukiman, pemerintahan, dan fasilitas umum yang rusak. Korban meninggal dunia sampai dengan rakor tersebut mencapai 2.840 orang. Kerusakan parah terjadi di Balaroa dan Petobo. Sekjen PBB Antonio Guterres mengungkapkan keprihatinan yang mendalam, dan solidaritas dari negara-negara anggota PBB. Sekjen PBB mengapresiasi respon cepat Pemerintah Indonesia dalam menangani bencana ini. Untuk itu, ia bersama para komunitas internasional akan terus mendukung, sehingga penanganan bencana ini menjadi efektif. Sementara CEO Bank Dunia Kristalina Georgieva menyampaikan rasa simpatinya atas apa yang terjadi di Palu, dan menyatakan bahwa tantangan dari bencana adalah membangun kembali dengan lebih baik. CEO Bank Dunia juga mengungkapkan, bahwa bencana di Palu adalah bencana yang unik. Hal ini berdasarkan data yang telah dibuat World Bank dari hasil asesmen mengenai daerah yang terdampak beserta kerugiannya. Untuk bantuan, World Bank telah menyiapkan dana sebesar US\$ 5 juta untuk rekonstruksi, dengan harapan dapat memberikan manfaat kepada mereka yang kehilangan segalanya. Pada rapat tersebut, Country Director for Indonesia, Asian Development Bank (ADB) Winfried Wicklein, yang hadir bersama Bank Dunia dan Sekjen PBB juga turut menyampaikan rasa keprihatinannya dan menyatakan ADB siap membantu.

Gambar 4.8

Rapat Koordinasi Pasca Gempa dan Tsunami di Sulawesi Tengah



Gambar 4.9

Kunjungan Pasca Gempa dan Tsunami di Sulawesi Tengah



4. Acara di Pusat

- Wakil Presiden membuka acara Widyakarya Nasional, Pangan dan Gizi (WNPG) XI, di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara Jakarta Selatan, pada tanggal 3 Juli 2018

Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) merupakan forum *multi stakeholder* antara akademisi, pemerintah, industri, dan masyarakat luas untuk memberikan rekomendasi arah perubahan kebijakan pangan dan gizi di Indonesia. WNPG XI Tahun 2018 ini mengangkat tema “Percepatan penurunan *stunting* melalui revitalisasi ketahanan pangan dan gizi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan”, yang diselenggarakan melalui kerja sama LIPI dengan Kemenko PMK, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenristekdikti, Kementerian Kesehatan, KKP, Kementerian Pertanian, Badan POM, dan BSN. Pada acara ini Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kalau anak yang lahir hari ini, tidak diberikan asupan gizi yang cukup, baik untuk ibu maupun anaknya, maka 20 atau 30 tahun yang akan datang menjadi generasi kerdil. Bangsa yang mempunyai generasi *stunting* atau kerdil itu pasti produktivitasnya rendah. Cara berpikirnya tentu berbeda sehingga pada akhirnya akan merusak produktivitas, merusak ekonomi masa depan. Stunting di Indonesia menempati nomor 4 di dunia, sebanyak 37% bayi kerdil, artinya, 9 juta anak bayi cenderung kerdil dan hal tersebut akan membahayakan jangka panjang bagi bangsa secara keseluruhan. Ibu-ibu memiliki peran penting dalam percepatan penurunan anak kerdil melalui pemberian asupan gizi yang cukup dan teratur kepada anak-anaknya. Permasalahan kerdil bukan soal baru, namun telah di tangani sejak dulu melalui program empat sehat lima sempurna yang dapat teruskan namun disesuaikan dengan kondisi saat ini. Pertemuan ini diharapkan dapat mengkampanyekan dan memberikan semangat kepada ibu-ibu di desa-desa atau kampung-kampung dan di kota-kota untuk memulai kembali memperbaiki atau mengingatkan akan pentingnya memberikan ASI, untuk memperbaiki gizi, pola makan supaya lebih sehat, agar masa depan bangsa ini depan tidak mengalami masalah-masalah yang dapat menyebabkan kehidupan tidak maju akibat produktivitas dari anak-anak.

Sebagai institut pendidikan dan riset bidang kedokteran pertama di Indonesia, Wakil Presiden berharap IMERI dapat menjadi pusat riset kesehatan dan kedokteran di Indonesia yang berkontribusi bagi dunia kedokteran dan kesehatan. Keberadaan lembaga riset yang baik di bidang kesehatan dan adanya partisipasi industri dapat membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang baik, luas, dan murah kepada masyarakat.

Gambar 4.10

Pembukaan Widyakara Nasional Pangan dan Gizi XI di Jakarta Selatan



- Wakil Presiden menyaksikan penandatanganan kerjasama antara INASGOC dengan 21 Perusahaan BUMN dan Swasta yang menjadi sponsor resmi Asian Games 2018 di Kantor Wakil Presiden Jakarta, pada 6 Juli 2018

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan rasa suka-citanya atas partisipasi para sponsor dari sejumlah perusahaan, baik swasta maupun BUMN serta kerja keras INASGOC dan jajarannya yang telah mempersiapkan pesta olah raga Asian Games XVIII Tahun 2018. Wakil Presiden menyatakan bahwa pada tahun 2032, Indonesia siap menjadi tuan rumah Olimpiade apabila sukses Asian Games 2018. Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga selaku Ketua Pengarah Asian Games 2018, telah melihat bahwa perbandingan fasilitas Olimpiade di banyak negara, dengan persiapan Asian Games termasuk jumlah atletnya, standar *venue*, serta sarana yang lain juga hampir sama. Terdapat tiga hal pokok dalam Asian Games, yaitu pertama, penyediaan *venue* infrastruktur, pelaksanaannya, dan terakhir anggaran penyelenggaraan yang membutuhkan banyak sponsor untuk mendanai penyelenggaraan di Jakarta dan Palembang.

Gambar 4.11

Penandatanganan Kerjasama antara INASGOC dengan Perusahaan Sponsor Asian Games 2018

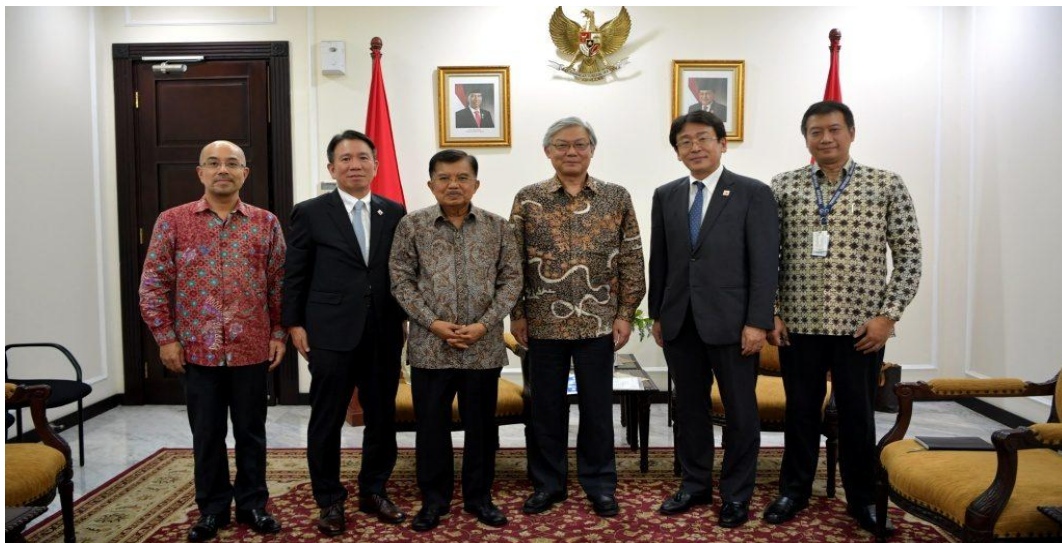


- Wakil Presiden menerima kunjungan Presiden/CEO Nippon Electric Company (NEC) Cooperation Japan Takasi Niino, di Kantor Wakil Presiden, Merdeka Utara, Jakarta, pada 3 September 2018

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara yang luas dan terdiri dari beberapa kepulauan, sangatlah membutuhkan fasilitas teknologi dalam mendukung perkembangan daerah masing-masing. Tanpa kemajuan teknologi informasi (TI), sangat sulit satu sama lainnya akan maju, sehingga dunia usaha juga akan mengalami kelambatan. Pemerintah Indonesia berharap bahwa kedepannya, kerjasama antara perusahaan-perusahaan Jepang dengan pengusaha-pengusaha Indonesia dapat terjalin lebih banyak lagi. Mengingat pentingnya hubungan kedua negara, khususnya pada bidang kerjasama pengembangan dunia TI, Wakil Presiden menyambut baik kerjasama atau peningkatan hubungan bisnis dan investasi dengan NEC, karena Jepang dianggap punya reputasi yang baik dalam bidang teknologi. Hubungan kerjasama antara NEC dengan Indonesia sebetulnya sudah terjalin sejak 56 tahun lalu, tepatnya pada saat AG keempat di Indonesia. Kala itu, NEC membantu TVRI dalam menyiarkan untuk pertama kalinya kegiatan AG tersebut melalui transmiter milik NEC. Diinformasikan pula bahwa NEC saat ini sedang membangun kerjasama dalam sebuah proyek '*early warning system*' terhadap gempa dan tsunami.

Gambar 4.12

Foto Bersama dengan CEO Nippon Electric Company di Jakarta

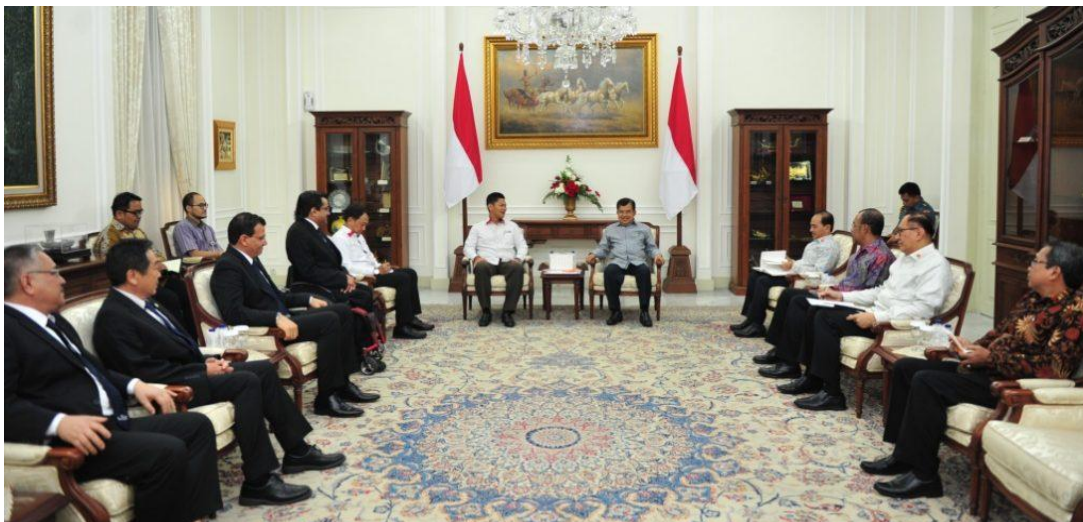


- Wakil Presiden menerima Presiden APC, Majeed Rasheed yang hadir bersama Raja Sapta Oktohari, Ketua Panitia Penyelenggara Asian Para Games (INAPGOC) di Istana Wakil Presiden, pada 3 April 2018

Wakil Presiden Jusuf Kalla pada pertemuan kali ini mengapresiasi dukungan Asian Paralympic Committee (APC) dan harapkan kesuksesan penyelenggaraan Asian Para Games kepada Presiden APC, Majeed Rasheed yang hadir bersama Raja Sapta Oktohari, Ketua Panitia Penyelenggara Asian Para Games (INAPGOC). Wakil Presiden mengharapkan semua fasilitas, termasuk IT yang mendukung penyelenggaraan Asian Games dapat digunakan juga pada penyelenggaraan Asian Para Games agar penyelenggaraan Asian Para Games lebih efisien. Sementara itu, dalam laporannya, Raja Sapta Oktohari, menyampaikan bahwa INAPGOC baru saja melaksanakan seminar untuk mengevaluasi persiapan penyelenggaraan Asian Para Games 2018. Seminar tersebut membahas persiapan terutama dalam tiga hal pokok yaitu *sport*, *athlete village* dan transportasi. Senada dengan hal tersebut, Presiden APC, Majeed Rasheed menyampaikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan Indonesia. Menurutnya Asia Para Games 2018 ini akan menjadi perhelatan yang sukses. Presiden APC menyatakan bahwa upaya yang dilakukan Indonesia ini merupakan pesan yang sangat kuat yang disampaikan kepada dunia bahwa semua manusia adalah setara, karena semua infrastruktur dapat diakses dan ramah terhadap penyandang disabilitas.

Gambar 4.13

Pertemuan dengan Presiden Asian Paralympic Committee di Jakarta



- Wakil Presiden memimpin Rapat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) di Kantor Wakil Presiden, pada 26 Maret 2018

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebagai Sekretaris DPOD menyampaikan laporan penyelesaian permasalahan yang sudah dilaksanakan DPOD sepanjang tahun 2017 dan sidang DPOD kali ini bertujuan untuk menyiapkan rekomendasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 guna memberikan saran dan pertimbangan yang akan disampaikan kepada Presiden terhadap kebijakan usulan DAK sebelum penetapan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro pada kesempatan tersebut menyampaikan hasil capaian kinerja DAK pada Tahun Anggaran 2017, capaian kinerja sampai dengan bulan Maret 2018, rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019, arah kebijakan DAK, pemetaan dukungan DAK dalam pencapaian prioritas nasional dalam RKP 2019, dan penyempurnaan aplikasi pengusulan DAK Fisik melalui aplikasi KRISNA. Wakil Presiden memberikan arahan bahwa hendaknya penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dipergunakan sesuai dengan arah kebijakan yang ingin dicapai. Bahwa DAK diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan oleh daerah, sehingga perencanaan dan realisasi anggaran oleh daerah harus sesuai target capaian kinerja masing-masing daerah. Pendidikan merupakan salah satu bidang utama dalam penggunaan anggaran DAK, begitu pula dengan kesehatan karena keberlangsungan bangsa bergantung pada generasi yang lahir sekarang sehingga harus diperhatikan pendidikan dan kesehatannya. DAK menutup kekurangan dan memberikan keseimbangan antara daerah yang lebih maju dengan daerah yang masih kurang.

Pada sidang tersebut perwakilan daerah yang terdiri atas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang diwakili oleh Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang diwakili oleh Bupati Nias Sokhiatulo Laoli, dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang diwakili Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany menyampaikan hambatan dan kendala implementasi kebijakan Pemerintah Pusat terkait DAK di daerah. Wakil Presiden meminta baik instansi daerah maupun pusat untuk berkoordinasi dengan baik, agar hambatan dan kendala yang dialami daerah dapat diminimalisasi sehingga tujuan penggunaan DAK baik DAK Reguler, DAK Afirmasi, dan DAK Penugasan sesuai dengan arah dan kebijakan yang sesuai dengan prioritas nasional.

Gambar 4.14

Rapat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah di Jakarta



- Wakil Presiden memimpin Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, di Kantor Wakil Presiden, pada tanggal 9 Agustus 2018

Pada rapat kali ini, Wakil Presiden meminta laporan dari beberapa peserta rapat, diantaranya adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Asman Abnur, mengenai perkembangan program Reformasi Birokrasi hingga saat ini, seperti rencana rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru untuk 2018, serta anggaran yang dibutuhkan, tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya. Perkembangan sejumlah langkah program yang telah dan akan dicapai Pemerintah, meliputi beberapa poin penting yang dibagi dalam empat hal, yaitu 1) mengenai Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi, 2) Mewujudkan Kelembagaan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien, 3)

Pembangunan Smart ASN dalam rangka mewujudkan *World Class Government*, dan 4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Menteri PANRB juga menyampaikan bahwa definisi Nilai Reformasi Birokrasi, yaitu merupakan tingkat perkembangan instansi pemerintah dalam penerapan budaya anti-korupsi yang ditandai dengan pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat semakin baik.

Gambar 4.15

Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional di Jakarta



- Wakil Presiden membuka Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Program Pendalaman Agama Islam di Indonesia bagi Pelajar Afganistan di Istana Wakil Presiden, tanggal 31 Agustus 2018. Pada acara tersebut, Wakil Presiden menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia selalu mendoakan dan berupaya keras mencapai perdamaian demi kemakmuran bersama. Program Diklat ini merupakan salah satu bentuk nyata dan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan perdamaian di Afganistan. Selain itu, program ini juga merupakan kelanjutan Pertemuan Trilateral Ulama Afganistan, Indonesia, dan Pakistan di Istana Bogor pada tanggal 11 Mei 2018 yang menghasilkan *Bogor Ulema Declaration for Peace*. Diklat ini diikuti oleh 80 orang siswa/siswi Afganistan yang berusia 17 s.d. 20 tahun untuk belajar dan menetap di Pondok Pesantren Tazakka, Jawa Tengah dan Pondok Pesantren Daarul 'Uluum, Jawa Barat. Kegiatan tersebut berlangsung selama 104 hari, mulai tanggal 1 September s.d. 13 Desember 2018. Wakil Presiden juga menyatakan bahwa generasi muda Afganistan memiliki masa depan dan harapan sehingga harus berupaya memperbaiki dan meningkatkan perdamaian di Afganistan. Selain itu, Beliau berharap para peserta dapat bergaul dengan pelajar lokal, belajar kehidupan

keislaman di Indonesia yang moderat dan penuh kedamaian, serta saling bertukar informasi dan pendapat dengan pelajar lokal.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua MUI Ma'ruf Amin, Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fachir, Perwakilan Kedutaan Besar Afganistan di Indonesia, Duta Besar RI di Kabul, Afganistan, serta Pengurus Harian MUI, Pondok Pesantren Tazakka, dan Pondok Pesantren Daarul 'Uluum.

Acara-acara resmi Wakil Presiden tersebut di atas juga didokumentasikan dalam bentuk notulen yang berisi pokok-pokok pembicaraan Wakil Presiden pada audiensi, rapat, peresmian acara di pusat dan pada saat melakukan kunjungan kerja ke daerah serta luar negeri. Tahun 2018, dokumentasi notulen Wakil Presiden berjumlah 325 notulen dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* sebagaimana diuraikan pada tabel 3.9 di bawah.

Tabel 3.10
Rekapitulasi Notulen Wakil Presiden

Jenis Kegiatan	Jumlah Notulen
Audiensi	235
Rapat / Rapat Intern	42
Kunjungan Kerja	48
Total	325

b) Capaian Kinerja Outcome

Sama halnya dengan IKU2, dalam penyusunan indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan (IKP) keprotokolan kepada Wakil Presiden digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden dari perangkat melekat dengan Wakil Presiden. Kuesioner disusun berdasarkan tujuan survei terhadap tingkat kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden.

Seluruh kuesioner dalam survei ini menggunakan pernyataan tertutup dan diukur dengan menggunakan skala *Likert* dengan 6 (enam) skala pengukuran adalah untuk menghindari jawaban netral dan ragu-ragu dari responden. Dalam menjawab kuesioner ini, responden diminta persetujuannya berdasarkan pernyataan yang tertera pada masing-masing kuesioner sebagai berikut:

Tabel 3.11
Tabrl Nilai Skala Likert yang digunakan pada kuesioner

No	Pernyataan	Nilai Pertanyaan
1	Sangat Tidak Setuju (STS)	1
2	Tidak Setuju (TS)	2
3	Agak Tidak Setuju (ATS)	3

4	Agak Setuju (AS)	4
5	Setuju (S)	5
6	Sangat Setuju (SS)	6

Responden dalam survei ini adalah perangkat melekat dengan Wakil Presiden yang terdiri dari: Kepala Sekretariat Wakil Presiden, para Deputi di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, Sekretaris Pribadi Wakil Presiden, Ajudan Wakil Presiden, Dokter Pribadi Wakil Presiden, pejabat/pegawai Biro Protokol, Tim Notulis Wakil Presiden, pengemudi rangkaian, Pasukan Pengamanan Presiden Grup B, pejabat dan pegawai Bidang Peliputan dan Dokumentasi, serta pejabat dan pegawai Subbagian Ketertiban dan Keamanan Dalam.

Metode Pengolahan Data

Nilai indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan (IKP) keprotokolan dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing pernyataan pelayanan. Dalam penghitungan IKP keprotokolan terhadap 15 pernyataan yang dikaji, setiap pernyataan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai Rata – Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Pernyataan}} = \frac{1}{22} = 0,045$$

$$= 1/15 = 0,067$$

Untuk memperoleh nilai IKP keprotokolan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKP} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Pernyataan}}{\text{Total Pernyataan yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKP yaitu antara 25 – 150, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

IKP Pernyataan Pelayanan X 25

Tabel 3.12
Nilai Persepsi, Interval IKP, Interval Konversi IKP, Mutu Pelayanan, dan
Kinerja Pelayanan untuk Pelayanan Keprotokolan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKP	Nilai Interval Konversi IKP	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1	1,00 – 1,83	25 – 45,75	F	Sangat Tidak Baik
2	1,84 – 2,66	46 – 66,5	E	Tidak Baik
3	2,67 – 3,49	66,75 – 87,25	D	Agak Tidak Baik
4	3,50 – 4,32	87,5 - 108	C	Agak Baik
5	4,33 – 5,15	108,25 – 128,75	B	Baik
6	5,16 – 6,00	129 - 150	A	Sangat Baik

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan (IKP) keprotokolan, jumlah dari setiap pernyataan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap pernyataan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap pernyataan merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap pernyataan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,067.

Tabel 3.13
Nilai Rata-rata Tiap Pernyataan

No.	Pernyataan	Nilai Pernyataan
1	Tata tempat, tata upacara, tata penghormatan pada acara Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan	5,41
2	Berpenampilan rapi dan ramah dalam memberikan pelayanan	5,52
3	Pelayanan prima dari awal hingga akhir acara	5,39
4	Cepat tanggap dalam mengatur dinamika acara	5,21
5	Acara Wakil Presiden tersusun dengan sistematis sesuai arahan dan berkenan Wakil Presiden	5,53
6	Mampu memahami selera Wakil Presiden dalam proses berjalannya acara	5,30
7	Menyediakan dukungan administrasi Wakil Presiden dengan baik	5,15
8	Bersedia dihubungi sewaktu-waktu	5,45
9	Memiliki kompetensi yang memadai	5,14
10	Mendokumentasikan notulen dengan tertib	5,26
11	Menjaga kerahasiaan notulen	5,39
12	Notulen dapat diakses sewaktu-waktu	5,26
13	Notulen berkualitas dari segi bahasa, substansi, dan sesuai selera Wakil Presiden	5,24
14	Dukungan administrasi perjalanan dinas (paspor, visa, dll.) dapat terpenuhi dengan baik	5,32
15	Dukungan perjalanan dinas (akomodasi, kendaraan rangkaian, penginapan) dalam kunjungan kerja terpenuhi dengan baik	5,18
	Rata-rata	5,32

Berdasarkan tabel 3.11 di atas menunjukkan bahwa rata-rata jawaban dari responden terhadap kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden secara umum adalah baik. Beberapa hal yang perlu untuk lebih ditingkatkan lagi adalah evaluasi pelayanan secara berkala, monitoring pelayanan dengan baik, dan perbaikan pelayanan.

Selanjutnya, untuk mengetahui nilai indeks kelancaran dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & (5,41 \times 0,067) + (5,22 \times 0,067) + (5,39 \times 0,067) + (5,21 \times 0,067) + (5,53 \times 0,067) + \\ & (5,30 \times 0,067) + (5,15 \times 0,067) + (5,45 \times 0,067) + (5,14 \times 0,067) + (5,26 \times 0,067) + \\ & (5,39 \times 0,067) + (5,26 \times 0,067) + (5,24 \times 0,067) + (5,32 \times 0,067) + (5,18 \times 0,067) = 5,32 \end{aligned}$$

Nilai indeks adalah **5,32**

Dengan demikian, nilai indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Nilai IKP setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar = $5,32 \times 25 = 133$.
- Mutu pelayanan **A**.
- Kinerja pelayanan **Sangat Baik**.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian kinerja pada IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung sebagai berikut:

- tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
- perencanaan yang baik atas anggaran dan kegiatan pelayanan keprotokolan dengan memperhitungkan penugasan mendadak Wakil Presiden yang merupakan penugasan Presiden sehingga semua kegiatan dapat diselesaikan dengan baik;
- Sumber Daya Manusia yang tersedia memiliki komitmen yang tinggi dalam memenuhi target kinerja yang telah direncanakan;
- Penyusunan jadwal penugasan petugas protokol dengan memperhitungkan penugasan mendadak kegiatan Wakil Presiden;
- adanya Standar Operasional Prosedur dalam melaksanakan pekerjaan khususnya untuk kegiatan-kegiatan Wakil Presiden yang penugasannya mendadak; serta
- koordinasi yang intensif baik dengan pihak internal maupun dengan pihak eksternal yaitu Kementerian/Lembaga/Pemda dan pihak terkait lainnya.

Anggaran yang disediakan untuk mencapai IKU tersebut di atas seluruhnya sebesar Rp 132.951.249.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp 121.971.332.120,00 (91,74%).

IK4: Persentase kegiatan pers, media, dan pelayanan informasi serta dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan acara lainnya di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan

a) Capaian Kinerja *Output*

Pada tahun 2018, capaian *output* indikator kinerja ini adalah 100%. Ada 2.910 kegiatan pers, media, dan pelayanan informasi serta dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan acara lainnya di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang seluruhnya telah diselesaikan, yaitu:

Tabel 3.14

**Kegiatan Pers, Media, dan Pelayanan Informasi serta Dokumentasi
Kegiatan Wakil Presiden dan Acara Lainnya di Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2018**

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah
1	Layanan Kewartawanan - Pencetakan ID card wartawan (1) - Penjadwalan Koordinator Lapangan (12)	13
2	Peliputan dan Dokumentasi - Foto dan video kegiatan Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden (465) - Foto dan video kegiatan Sekretariat Wakil Presiden (76) - Transkrip kegiatan Wakil Presiden (177) - Audio kegiatan Wakil Presiden (350)	1.068
3	Diseminasi Informasi - Publikasi liputan kegiatan Wakil Presiden melalui <i>website</i> (417) - Publikasi liputan kegiatan Wakil Presiden melalui media sosial (1411) - Publikasi liputan kegiatan Wakil Presiden melalui Majalah Mersela (1)	1.829
Total		2.910

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Pada tahun 2018, capaian *outcome* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu terdapat 2.910 kegiatan pers, media, dan pelayanan informasi serta dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan acara lainnya di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan dan menjadi sumber keterbukaan informasi kepada publik.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja lainnya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- adanya komitmen yang tinggi dari setiap SDM untuk mencapai target kinerja;

- penyusunan jadwal penugasan SDM bagi setiap kegiatan peliputan Wakil Presiden baik yang terjadwal maupun antisipasi penugasan mendadak;
- membuat rencana kontijensi atas pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- tersedianya Standar Operasional Prosedur dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pers, media, dan pelayanan informasi serta dokumentasi kegiatan Wakil Presiden serta acara lainnya di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden; dan
- koordinasi yang intensif dengan para pemangku kepentingan yang terkait.

Anggaran yang disediakan untuk mencapai indikator kinerja lainnya tersebut di atas seluruhnya sebesar Rp 133.412.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp 129.451.367,00 (97,03%).

IK5: Persentase kegiatan pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan

a) Capaian Kinerja *Output*

Pada tahun 2018, capaian *output* indikator kinerja ini adalah 100%. Ada 53.572 pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang seluruhnya telah diselesaikan, yaitu:

Tabel 3.15
Pelayanan Administrasi Umum di Lingkungan
Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2018

No.	Jenis	Jumlah
1	Bahan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI	3
2	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Sekretariat Wakil Presiden	16
3	Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Sekretariat Wakil Presiden	16
4	Berkas pertanggungjawaban (UP dan LS) yang diverifikasi	4.780
5	Surat Perintah Membayar (SPM)	2.070
6	Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Bendahara	12
7	Laporan Akuntansi Keuangan	10
8	Laporan Akuntansi Barang Milik Negara (BMN)	5
9	Perjanjian Kinerja pejabat dan/atau pegawai Sekretariat Wakil Presiden	277
10	Rencana Aksi Sekretariat Wakil Presiden	12
11	Laporan Kinerja di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden	21
12	Penanganan surat/memorandum masuk	20.525
13	Penanganan/penomoran surat keluar (biasa dan rahasia)	3.763
14	Pendistribusian surat/memorandum di internal dan eksternal	1.989
15	Pendataan dan penataan arsip	3.239

16	Pencetakan buku acara kegiatan Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden	63
17	Penggandaan dan penjilidan dokumen	70
18	Pencetakan kartu ucapan/sertifikat	48
19	Peta Jabatan Sekretariat Wakil Presiden	12
20	Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Wakil Presiden	12
21	Analisa Jabatan pejabat dan/atau pegawai Sekretariat Wakil Presiden	321
22	Analisa Beban Kerja pejabat dan/atau pegawai Sekretariat Wakil Presiden	301
23	Pengurusan kenaikan pangkat	68
24	Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat Wakil Presiden	210
25	Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Sekretariat Wakil Presiden	306
26	Pengurusan pensiun	15
27	Penghargaan Satyalancana Wira Karya dan Satyalancana Karya Satya	48
28	Penegakan hukuman disiplin pegawai	9
29	Cuti besar, cuti sakit, dan cuti bersalin	423
30	Laporan perkawinan, penambahan anak, dan kematian	29
31	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	45
32	Pengadaan tenaga alih daya	1
33	Daftar pengunjung ke poliklinik umum	2.342
34	Daftar pengunjung ke poliklinik gigi	758
35	Pengadaan obat-obatan Sekretariat Wakil Presiden	3
36	Pengadaan obat-obatan Dokter Pribadi Kepresidenan	12
37	Laporan kasus pasien	3.100
38	Laporan pemasukan, pengeluaran, dan saldo obat-obatan pada poliklinik umum	12
39	Laporan pemasukan, pengeluaran, dan saldo obat-obatan pada poliklinik gigi	12
40	Pengadaan, perawatan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana bangunan	271
41	Pengadaan, perawatan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan	506
42	Pengadaan, perawatan, serta pemeliharaan kendaraan	293
43	Permohonan dukungan kendaraan dinas dan pengemudi	4.171
44	Daftar pengunjung perpustakaan	2.700
45	Pengadaan bahan pustaka (eksemplar)	630
46	Alih media bahan pustaka (koleksi khusus)	41
47	Pelaporan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	1
48	Pelayanan kerumahtanggaan kepada Sekretariat Wakil Presiden	1
Total		53.572

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Pada tahun 2018, capaian *outcome* indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu terdapat 49.401 pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan dan menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pimpinan.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja lainnya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dalam mencapai target kinerja;
- tersedianya SOP dan petunjuk pelaksanaan (juklak) maupun petunjuk teknis (Juknis) terkait pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden;
- dokumen dan data dukung telah disimpan dalam database masing-masing unit kerja; dan
- koordinasi yang intensif dengan para pemangku kepentingan terkait.

Anggaran yang disediakan untuk mencapai indikator kinerja lainnya tersebut di atas seluruhnya sebesar Rp 68.944.388.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp 66.570.300.646,00 (96,56%).

IK6: Jumlah laporan program, anggaran, dan keuangan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang disusun

Capaian indikator kinerja lainnya ini adalah 2 dokumen (100%), tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2017 dan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2017. Renja Sekretariat Wakil Presiden merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Wakil Presiden yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), disusun untuk periode satu tahun.

IK7: Jumlah laporan pengelolaan dana operasional Wakil Presiden

Capaian indikator kinerja lainnya ini adalah 1 dokumen (100%), tersusunnya laporan pengelolaan Dana Operasional dan Bantuan (DOB) Wakil Presiden. DOB adalah dana yang digunakan untuk menunjang kegiatan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Wakil Presiden yang pengeluarannya dilakukan berdasarkan perintah/kewenangan Wakil Presiden. Pada tahun 2018, dalam dokumen DOB, terdapat 12 laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan DOB.

Anggaran yang disediakan untuk mencapai indikator kinerja lainnya tersebut di atas adalah sebesar Rp 18.000.000.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp 15.771.837.670,00 (87,62%).

3.2 Perbandingan Capaian Kinerja IKU Tahun 2017 dan Tahun 2018

Berdasarkan capaian kinerja Tahun 2018, dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan kinerja dari nilai indeks kualitas pelayanan dan indikator kinerja lainnya. Hal ini dapat terwujud karena komitmen yang tinggi seluruh jajaran pimpinan beserta staf untuk terus melakukan perbaikan kinerja. Perbandingan capaian kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.16
Perbandingan Capaian Kinerja Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2017 dan 2018

Tahun 2017				Tahun 2018			
IKU	Target	Realisasi	Capaian	IKU	Target	Realisasi	Capaian
IKU1: Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100% (324 Laporan)	100%	IKU1: Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100% (365 Laporan)	100%
IKU2: Persentase kelancaran dukungan pemberian pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden	4.33	5.30	100%	IKU2: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden	4,44	5.32	100%
IKU3: Persentase kelancaran dukungan pemberian pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden	4.33	5.16	100%	IKU3: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden	4,44	5.28	100%
IK4: Persentase kegiatan pers, media, dan pelayanan informasi serta dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan acara lainnya di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan	100%	100% (1.605 kegiatan)	100%	IK4: Persentase kegiatan pers, media, dan pelayanan informasi serta dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan acara lainnya di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan	100% (2.901 kegiatan)	100% (2.901 kegiatan)	100%
IK5: Persentase kegiatan pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan	100%	100% (29.669 kegiatan)	100%	IK5: Persentase kegiatan pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan	100% (49.401 kegiatan)	100% (49.401 kegiatan)	100%
IK6: Jumlah laporan program, anggaran, dan keuangan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100%	IK6: Jumlah laporan program, anggaran, dan keuangan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang disusun	2 dokumen	100%	2 dokumen
IK7: Jumlah laporan pengelolaan dana operasional Wakil Presiden	1 laporan	1 laporan	100%	IK7: Jumlah laporan pengelolaan dana operasional Wakil Presiden	1 laporan	100%	1 laporan
			100%	Rata-rata Capaian IKU			100%

3.3 Perbandingan Capaian Kinerja IKU Tahun 2015 s.d 2018

Mengingat Tahun 2018 merupakan tahun ke-4 dalam pencapaian tujuan jangka menengah, untuk itu Sekretariat Wakil Presiden terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja dengan menyusun program kegiatan di Tahun 2019 didasarkan pada evaluasi kinerja Sekretariat Wakil Presiden yang dicapai sejak Tahun 2015 s.d 2018. Perbandingan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.17
Perbandingan Capaian Kinerja Sekretariat Wakil Presiden
Tahun 2015 s.d 2018

Tahun 2015				Tahun 2016			
IKU	Target	Realisasi	Capaian	IKU	Target	Realisasi	Capaian
IKU1: Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100% (45 Laporan)	100%	IKU1: Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100% (28 Laporan)	100%
IKU2: Persentase kelancaran dukungan pemberian pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden	100%	100% (1245 kegiatan)	100%	IKU2: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden	4,33	5,16	100%
IKU3: Persentase kelancaran dukungan pemberian pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden	100%	100% (1112 kegiatan)	100%	IKU3: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden	4,33	5,13	100%
Rata-rata Capaian IKU			100%	Rata-rata Capaian IKU			100%

Tahun 2017				Tahun 2018			
IKU	Target	Realisasi	Capaian	IKU	Target	Realisasi	Capaian
IKU1: Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100% (324 Laporan)	100%	IKU1: Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100% (365 Laporan)	100%
IKU2: Persentase kelancaran dukungan pemberian pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden	4.33	5.30	100%	IKU2: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden	4,44	5.32	100%
IKU3: Persentase kelancaran dukungan pemberian pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden	4.33	5.16	100%	IKU3: Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden	4,44	5.28	100%
IK4: Persentase kegiatan pers, media, dan	100%	100% (1.605)	100%	IK4: Persentase kegiatan pers, media, dan	100% (2.901)	100% (2.901)	100%

Tahun 2017				Tahun 2018			
IKU	Target	Realisasi	Capaian	IKU	Target	Realisasi	Capaian
pelayanan informasi serta dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan acara lainnya di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan		kegiatan)		pelayanan informasi serta dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan acara lainnya di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan	kegiatan)	kegiatan)	
IK5: Persentase kegiatan pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan	100%	100% (29.669 kegiatan)	100%	IK5: Persentase kegiatan pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan	100% (49.401 kegiatan)	100% (49.401 kegiatan)	100%
IK6: Jumlah laporan program, anggaran, dan keuangan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100%	IK6: Jumlah laporan program, anggaran, dan keuangan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang disusun	2 dokumen	100%	2 dokumen
IK7: Jumlah laporan pengelolaan dana operasional Wakil Presiden	1 laporan	1 laporan	100%	IK7: Jumlah laporan pengelolaan dana operasional Wakil Presiden	1 laporan	100%	1 laporan
			100%	Rata-rata Capaian IKU			100%

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2018, Sekretariat Wakil Presiden memperoleh pagu definitif sebesar Rp 131.800.000.000,00. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, maka pada saat itu perlu dilakukan penyesuaian anggaran mengenai tunjangan kinerja dimaksud. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara kemudian mengirimkan memorandum Nomor M-100/Ses/PR.00.03/03.2018 tanggal 6 Maret 2018 perihal Penetapan Penyesuaian Alokasi Anggaran TA 2018 untuk Pemenuhan Belanja Operasional Pegawai Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2018 yang didalamnya meminta Sekretariat Wakil Presiden untuk menyesuaikan anggaran yang akan dialihkan untuk pemenuhan belanja operasional pegawai. Oleh karena itu, terdapat penyesuaian anggaran pada pagu Sekretariat Wakil Presiden sebesar Rp9.027.662.000,00 sehingga total pagu setelah penyesuaian pemenuhan belanja pegawai sebesar Rp122.772.338.000,00.

Selanjutnya, Sekretariat Wakil Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara mengajukan usulan revisi atas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Bagian Anggaran Kementerian Sekretariat Negara (BA 007) untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara (007.04.01). Usulan tersebut disetujui dengan

dikeluarkannya surat dari Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hal Penyampaian Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA) dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Kementerian Sekretariat Negara (BA 007). Menteri Keuangan telah menyetujui penyediaan dan realokasi anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke unit organisasi Sekretariat Wakil Presiden (007.04) pada tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp107.308.273.000,00. Dengan demikian, alokasi anggaran Sekretariat Wakil Presiden Tahun Anggaran 2018 menjadi Rp230.080.611.000,00.

Pada bulan November 2018, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara pada undangan Nomor B-4282/Kemensetneg/Ses/PR.00.03/11/2018 tanggal 27 November 2018 perihal Pembahasan Prognosis Serapan Anggaran Sekretariat Wakil Presiden TA 2018 meminta Sekretariat Wakil Presiden untuk melakukan penyesuaian anggaran kembali untuk pemenuhan belanja layanan perkantoran pada Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara, dalam hal ini penyesuaian dilakukan dengan merealokasi pada anggaran Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara. Oleh karena itu, dilakukan revisi pada tanggal 30 November 2018 sebesar Rp708.707.000,00 sehingga pagu akhir Sekretariat Wakil Presiden menjadi sebesar Rp229.371.904.000,00.

Dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Wakil Presiden, alokasi anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan, baik yang mendukung langsung IKU Sekretariat Wakil Presiden yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, maupun kegiatan-kegiatan yang tidak secara langsung mendukung IKU Sekretariat Wakil Presiden (indikator kinerja lainnya). Berikut matriks pagu anggaran kegiatan IKU dan indikator kinerja lainnya pada Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2018.

Tabel 3.18
Pagu Anggaran Kegiatan IKU dan IK Sekretariat Wakil Presiden
Tahun 2018

No.	Deputi	Pagu Kegiatan		Total Pagu (Rp)
		IKU (Rp)	IK (Rp)	
1	Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman	871.428.000	-	871.428.000
2	Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan	616.135.000	-	616.135.000
3	Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan	707.303.000	133.412.000	840.715.000
4	Deputi Bidang Administrasi	140.099.238.000	81.479.660.000	183.172.261.000
	1. Biro Protokol	140.099.238.000	-	143.339.386.000
	2. Biro Perencanaan dan Keuangan	-	26.922.740.000	26.922.740.000
	3. Biro Tata Usaha, Teknologi Informasi, dan Kepegawaian	-	8.381.523.000	8.381.523.000
	4. Biro Umum	-	46.175.397.000	46.175.397.000

No.	Deputi	Pagu Kegiatan		Total Pagu (Rp)
		IKU (Rp)	IK (Rp)	
5	Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)	-	2.224.580.000	2.224.580.000
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN		142.294.104.000	83.872.817.000	229.371.904.000

Pada tahun 2018, jumlah anggaran Sekretariat Wakil Presiden yang dialokasikan untuk kegiatan yang mendukung IKU sebesar Rp 142.294.104.000,00 atau sebesar 62,04% dari total pagu Sekretariat Wakil Presiden. Realisasi anggaran kegiatan yang mendukung IKU pada tahun 2018 mencapai Rp 131.041.117.989,00 atau hanya terserap sebesar 92,09% dari total pagu anggaran kegiatan yang mendukung IKU sebesar Rp 142.294.104.000,00. Adapun realisasi pagu anggaran kegiatan yang mendukung IKU Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2018 tersebut sebagaimana diuraikan pada tabel 3.16 di bawah.

Tabel 3.19
Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan IKU
Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2018

No.	Deputi	Kegiatan IKU		%
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman	871.428.000	857.279.245	98,37
2	Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan	616.135.000	605.016.599	98,19
3	Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan	707.303.000	661.952.774	93,68
4	Deputi Bidang Administrasi	140.099.238.000	131.041.117.989	93,53
	1. Biro Protokol	140.099.238.000	131.041.117.989	93,53
	2. Biro Perencanaan dan Keuangan	-	-	-
	3. Biro Tata Usaha, Teknologi Informasi, dan Kepegawaian	-	-	-
	4. Biro Umum	-	-	-
5	Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)	-	-	-
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN		145.499.087.000	133.875.244.485	92,01

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, realisasi anggaran Sekretariat Wakil Presiden dilihat dari capaian pada masing-masing program, baik program yang memuat kegiatan-kegiatan IKU maupun IK secara keseluruhan mencapai Rp 213.512.707.672,00 atau sebesar 93,09% dari pagu total sebesar Rp 229.371.904.000,00.

Tabel 3.20
Realisasi Anggaran per Program Tahun 2018

No.	%	Pagu	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Sekretariat Negara	83.704.240.000	79.538.979.219	95,02%	IK
2	Penyelenggaraan pelayanan dukungan kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden	145.667.664.000	133.973.728.453	91,97%	IKU + IK
Total		229.371.904.000	213.512.707.672	xxx	

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Keuangan

Realisasi anggaran Sekretariat Wakil Presiden Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 213.612.707.672,00 atau 93,09% dari pagu anggaran sebesar Rp 229.371.904.000,00 dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan efisiensi anggaran layanan perkantoran dengan membatasi penggunaan listrik, pengaturan suhu minimum ruangan, dan pembatasan penggunaan kertas;
- b. Pembatasan biaya lembur, *snack* rapat, makan siang, dan belanja barang operasional lainnya; dan
- c. Kebijakan penghematan anggaran biaya perjalanan dinas luar kota dialihkan di dalam kota atau di dalam kantor.

2. Sarana dan Prasarana

Efisiensi dalam penggunaan sarana dan prasarana antara lain:

- a. Kebijakan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana kantor, seperti penggunaan listrik, pengaturan suhu minimum ruangan, dan pembatasan penggunaan kertas;
- b. penerapan aplikasi perkantoran untuk *sharing files* sehingga meminimalisir penggunaan kertas dokumen cetak (*paperless*).
- c. Pemanfaatan komunikasi melalui media sosial (WA Group) dan surat elektronik dalam penyampaian undangan rapat dan pengumuman harian;
- d. Digitalisasi dokumen perkantoran sehingga mengurangi pemakaian kertas (*paperless*).

3. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peta Jabatan Sekretariat Wakil Presiden per Desember 2018, hanya 361 formasi jabatan struktural dan fungsional yang terisi dari 657 formasi yang ada (54,95%). Namun demikian, melalui komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh SDM, Sekretariat Wakil Presiden dapat memperoleh capaian kinerja 100%. Dukungan jumlah sumber daya manusia

sebanyak 361 orang, terdiri dari aparatur sipil negara, perbantuan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), staf khusus Wakil Presiden, serta staf pada staf khusus.

3.5 Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan Kinerja Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2017 telah dimanfaatkan antara lain dengan melaksanakan dan merencanakan kegiatan pada tahun 2018 sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

- Reviu atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Wakil Presiden dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Sekretariat Wakil Presiden Nomor 14 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Wakil Presiden tanggal 7 Mei 2018;
- Melakukan reviu dokumen Perjanjian Kinerja mulai dari tingkat pejabat struktural sampai dengan pelaksana; dan
- melakukan revisi Perjanjian Kinerja Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2017 sehingga terdapat keselarasan dengan Indikator Kinerja Utama.

b. Peningkatan Kinerja

- Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan Aparatur Sipil Negara berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang menitikberatkan pada sistem prestasi kerja, penilaian prestasi kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden menjalankan Sistem Penilaian Kinerja yang dimuat dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (SIMSDM) melalui pengisian Sasaran Kerja Pegawai (SKP), persetujuan SKP, penilaian SKP, penilaian perilaku kerja, monitoring dan evaluasi SKP, serta pendokumentasian seluruh proses penilaian prestasi kerja;
- Pelaksanakan Sistem Penilaian 360° atas kinerja seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara yang juga dimuat dalam aplikasi SIMSDM.

3.6 Capaian Kinerja Lainnya

Pada tahun 2018, Sekretariat Wakil Presiden mendapatkan penilaian dan apresiasi dari para pemangku kepentingan, seperti:

- #### **a.**
- Wakil Presiden dalam puncak rangkaian acara Refleksi Akhir Tahun 2018: Lebih Cepat dan Lebih Baik Melayani Wakil Presiden Republik Indonesia, pada tanggal 15 Desember 2018, memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh staf serta harapannya seluruh staf dapat bekerja lebih baik lagi di masa akan datang; dan

- b. Sekretariat Wakil Presiden memperoleh nilai **90,52** dengan kriteria “**AA**” atau predikat **SANGAT MEMUASKAN** atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja/Satuan Kerja Tahun 2017 yang dilakukan oleh Tim Evaluator dari Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja, Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara.
- c. Sekretariat Wakil Presiden mengikutsertakan aplikasi Sistem Informasi Monitoring Manajemen Risiko (SIMONARI) pada Lomba Inovasi SPIP HUT Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ke-35 tahun 2018 dan memenangkan Juara I pada Tingkat Kementerian/Lembaga. SIMONARI ini merupakan keberlanjutan dari penyusunan peta risiko pada tahun 2017. Melalui SIMONARI ini setiap pemilik risiko dapat memonitor penanganan risiko di unit kerjanya masing-masing.
- d. Pada tahun 2018, Sekretariat Wakil Presiden menerima penghargaan Lomba Inovasi tingkat Kementerian Sekretariat Negara melalui aplikasi *e-Activity*, yaitu aplikasi yang berfungsi mendokumentasikan secara digital semua aktivitas harian yang dilakukan pegawai secara *real time*. Outputnya berupa laporan aktivitas harian dan laporan periode kegiatan pegawai yang dikerjakan dalam kurun waktu tertentu (harian atau periodik). Aplikasi ini memungkinkan pegawai untuk memonitoring aktivitas yang mendukung pencapaian target kinerja. Namun demikian, pada akhir tahun 2018, Biro SDM Kementerian Setneg meluncurkan aplikasi PIAWAI yang secara substansi memiliki fungsi yang sama dengan *e-Activity* sehingga penggunaan *e-Activity* digantikan oleh PIAWAI.

3.7 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Sekretariat Wakil Presiden telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Sekretariat Wakil Presiden tahun 2017 dan akan menjadikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Sekretariat Wakil Presiden tahun 2018 oleh Tim Evaluator dari Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja, Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara untuk perbaikan kinerja tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.21
Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2018

Rekomendasi	Kegiatan
Tahun 2018	
(1) Memastikan monitoring Rencana Aksi menginformasikan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara periodik terkait	(1) Membuat jadwal monitoring atas pelaksanaan Rencana Aksi setiap bulannya untuk memastikan bahwa Rencana Aksi telah menginformasikan perkembangan

kendala dan solusi (2) Rapat atau forum yang membahas progress kinerja agar diselenggarakan secara bulanan	pelaksanaan kegiatan secara periodik terkait kendala dan solusi (2) Membuat jadwal rapat atau forum yang membahas progress kinerja secara periodik/bulanan
--	--

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Laporan Kinerja Tahun 2018 merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Wakil Presiden di tahun keempat dalam mencapai visi yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2015-2019. Laporan Kinerja ini menunjukkan keberhasilan dan/atau kegagalan capaian strategis sepanjang tahun 2018 yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja lainnya dengan analisis kinerja berdasarkan sasaran strategis.

Secara umum, pencapaian sasaran strategis telah sesuai dengan yang ditargetkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Sasaran Strategis (1): Meningkatnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam mendukung tugas Wakil Presiden, didukung oleh IKU1 dengan capaian kinerja IKU sebesar 100% (365 laporan analisis). Pencapaian sasaran strategis ini merupakan tanggung jawab dari seluruh kedeputian substansi (Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman; Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan; serta Pemerintahan).

Capaian kinerja Sasaran Strategis 2: Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Wakil Presiden, didukung oleh IKU2, IKU3, IK4, IK5, IK6, dan IK7. Capaian kinerja IKU2 adalah nilai indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden sebesar 5,32, mutu pelayanan A, dan kinerja pelayanan Sangat Baik. Capaian kinerja IKU3 adalah nilai indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden sebesar 5,28, mutu pelayanan A, dan kinerja pelayanan Sangat Baik. Capaian kinerja IK4 sebesar 100% atau ada 2.401 kegiatan pers, media, dan pelayanan informasi serta dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan acara lainnya di Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan. Capaian kinerja IK5 sebesar 100% atau ada 49.901 kegiatan pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan. Capaian kinerja IK6 adalah tersusunnya dua dokumen (100%) laporan program, anggaran, dan keuangan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden. Selanjutnya, capaian kinerja IK7 adalah tersusunnya satu dokumen laporan pengelolaan dana operasional Wakil Presiden (100%). Kinerja pada IKU2, IKU3, IK5, IK6, dan IK7 merupakan kontribusi dari pelaksanaan tugas Deputi Bidang Administrasi, sedangkan IK4 merupakan kontribusi dari pelaksanaan tugas Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan.

Adanya dukungan kinerja dari seluruh kedeputian di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden, baik kedeputian substansi maupun administrasi, capaian kinerja pada sasaran strategis Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2018 mencapai 100%.

Pada sisi anggaran, tahun 2018 dengan keseluruhan pagu anggaran sebesar Rp 229.371.904.000,00 mencapai realisasi Rp 213.512.707.672,00 atau sebesar 93,09%. Sementara untuk pagu anggaran kinerja IKU tahun 2018 yang ditargetkan sebesar Rp 142.294.104.000,00 terealisasi sebesar Rp 131.041.117.989,00 atau 92,09%.

4.2. Upaya Ke Depan

Sekretariat Wakil Presiden kedepan perlu terus melakukan upaya-upaya perbaikan dan fokus pada peningkatan kualitas analisis kebijakan maupun kualitas pelayanan kepada Wakil Presiden. Hal ini diperlukan untuk mencapai target kinerja dengan jumlah SDM yang terbatas. Upaya-upaya tersebut antara lain:

- terus berupaya melakukan inovasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pencapaian kinerja;
- meningkatkan dan menguatkan jejaring kerja dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan *stakeholders* terkait lainnya;
- meningkatkan kualitas data dan aplikasi pengelolaan data analisis kebijakan untuk peningkatan kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden;
- mendorong alokasi belanja barang agar lebih efisien dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja.

Akhirnya, Laporan Kinerja Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2018 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan pengelolaan sumber sepanjang tahun 2018, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja Sekretariat Wakil Presiden yang lebih baik di masa yang akan datang.
